

Bidang Unggulan : Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengerahuan, Teknologi, Sosial, dan humaniora untuk peningkatan daya saing bangsa
Kode>Nama Rumpun Ilmu: 618 / Sejarah

LAPORAN PENELITIAN



DARI PASAR DESA KE PLAZA PERKEMBANGAN KOMERSIALISASI RUANG DAN DAMPAKNYA DI KOTA MALANG 1930-1999

Peneliti:

**Dr. R REZA HUDIYANTO S.S., M. Hum (0021037404)
EKI ROBI KUSUMA
RONAL RIDOI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
November 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

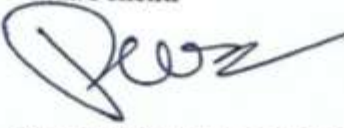
Judul Penelitian : DARI KOLONIALISASI, NASIONALISASI
DAN KAPITALISASI: DINAMIKA
SIMBOL-SIMBOL KAPITALISME DI
KOTA MALANG
1930-2000

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr. R REZA HUDIYANTO S.S., M. Hum
NIDN : 0021037404
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Sejarah
Nomor HP : 081945905203
Surel (e-mail) : reza_hudiyanto@yahoo.com
Anggota : Eki Robi Kusuma
Ronald Ridoi

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun
Penelitian Tahun Ke : -
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 12.500.000,-
Sumber Pembiayaan : BLU

Mengetahui
Desain FIS UM

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd
NIP. 196207171987012001

Malang, 02-11 - 2015
Ketua Peneliti

(Dr. R REZA HUDIYANTO S.S., M.Hum)
NIP 197403211999031004

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian UM

Prof. Dr. Aclima Fatchan, M.Pd
NIP 195707151986011002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Metode dan Langkah Penelitian	10
F. Target Penelitian dan Kontribusi	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A.Kapitalisme dan Imperialisme.....	14
B. Perkembangan Kota.....	18
C. Simbol Kota.....	22
BAB III PAPARAN DATA	24
A.Perkembangan Ekonomi Liberal di Wilayah Malang.....	24
B. Kondisi Ekologi Kota.....	30
C. Menciptakan Mesin Uang.....	31
D. Periode Rekonstruksi dan Dekonstruksi	39
E. Nasionalisme.....	42
F. Kebangkitan Kembali Simbol Kapitalisme	48
BAB IV KESIMPULAN	61
A.Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
LAMPIRAN FOTO	65
1.Foto Pasar Besar yang diresmikan Mendagri Rudini tahun 1992 (Jawa Pos, April 1992).....	65

2. Gajah Mada Plaza 1995 (Jawa Pos Oktober 1985).....	65
3. Tempat parkir yang semrawut di depan Malang Plaza (Jawa Pos Oktober 1985)	66
4. Foto papan reklame yang dianggap mengganggu pemandangan (Jawa Pos, Oktober 1985.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

”Bukanlah karena kebaikan dari tukang potong hewan, tukang giling gandum dan tukang roti kita bisa menikmati makan malam, akan tetapi itu semua berkat dari kepentingan mereka sendiri. Kita telah membawa diri kita sendiri bukan menuju ke kemanusiaan namun ke egoisme dan tidak pernah mempertanyakan pada mereka tentang kebutuhan kita namun keuntungan mereka. Tidak seorangpun kecuali seorang pengemis yang menggantungkan pada kemurahan dari sesama warga kota. (Adam Smith; *Wealth of Nation* 1776).

Kutipan diatas mengindikasikan bahwa kehidupan kota (di Barat) sangat dijiwai oleh apa yang disebut sebagai pragmatisme atau motif mencari keuntungan. Egois adalah karakter dari mayoritas penduduk perkotaan. Tentu saja pendapat ini muncul di lingkungan kebudayaan Eropa, khususnya Inggris yang terkenal dengan individualisme. Tren kebudayaan ini secara gradual mulai dialami masyarakat kota-kota di Asia, khususnya Indonesia melalui apa yang disebut dengan *worldwide capitalism* (kapitalisme yang mendunia). Bagaimanakah proses perkembangan kapitalisme perkotaan?

Menurut Sjoberg, perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu teknologi dan kekuatan sosial. Alam menyediakan kebutuhan pokok hidup manusia berupa air, dan tanah; teknologi merupakan syarat awal manusia untuk dapat ”menjinakkan” alam yang liar dan ganas menjadi bersahabat bagi kehidupan sebuah pemukiman. Teknologi akan menjamin surplus pangan bagi penduduk kota dan bahan mentah untuk menopang teknologi non agrikultur. Faktor kedua struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan adalah sarana yang mampu menggerakkan mekanisme dimana penguasa dapat mengkonsolidasi dan mempertahankan kekuasaan dan lebih penting lagi mampu mengembangkan formasi pusat kota. Struktur kekuasaan ini adalah variable penting dalam ekspansi kota baik jumlah penduduk maupun luas wilayah. Kedua, sosial power sangat penting dalam proses perubahan kawasan pinggiran kota dari desa ke kota. Ketiga struktur kekuasaan sangat penting dalam

proses mempertahankan kehidupan kota dari ancaman kriminalitas, pemberontakan dan serangan dari luar. (Sjoberg; 1960, 67-68)

Dalam artikel yang berjudul *The City of Entreprises*, Hall menyebut bahwa dinamika kota sangat dipengaruhi oleh satu faktor yaitu perusahaan. Perusahaan sangat berpengaruh baik secara ekonomi maupun politik terhadap perencanaan kota. Pada tahun 1970 an gerakan perencanaan kota mulai mengalami percepatan. Selama tahun 1980 di dunia muncul kecenderungan upaya melakukan pembangunan ulang. Muncul pemaknaan baru sebagai respon terhadap tradisi lama yang dianggap sudah usang. Kota merupakan mesin untuk menciptakan kekayaan, oleh karena itu rencana yang paling pertama dan utama, kota harus menjadi sebuah mesin uang. Peran pengembang, penasihat tradisional menjadi penting. Mereka merupakan pekerja lapangan yang menterjemahkan ambisi politik ke dalam struktur kota. Sebagai contoh adalah perubahan pola tata kota. Pola perencanaan kota tradisional berkembang pada era 1950 hingga 1960, seiring dengan periode emas kapitalisme yang juga ditandai dengan pertumbuhan fisik secara luar biasa. Ini tidak hanya terjadi pada kota-kota di Brititish namun juga pada kota-kota di Amerika. Terjadinya krisis pada tahun 1964 hingga tahun 1967 telah mendorong Pemerintahan Presiden Lindon Johnson untuk meningkatkan dua kali lipat program anti-kemiskinan perkotaan (*Urban anti-poverty Programme*) terutama setelah kerusuhan tahun 1967. Salah satu menifestasi dari program ini adalah penyusunan model-model pengembangan perencanaan kota yang berkoordinasi dengan program pengembangan asosiasi (perhimpunan) masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat yang terpinggirkan. Namun program ini mendapat tantangan dari birokrasi lokal dan pada tahun 1976 program ini gagal (Hall; 1988, 344).

Di Inggris, muncul kecenderungan bahwa ada kekuatan *super power* yang selalu masuk dalam perencanaan kota yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan kekuatan yang utama pada era pasca Perang Dunia Kedua. Ekonomi kapitalis yang ditopang oleh industri menyebabkan meningkatnya konsentrasi modal di tangan "kelompok yang sedikit dan memegang monopoli". Kelompok ini kemudian mengendalikan firma-firma dan industri dan memisahkannya dari pengusaha lokal

untuk kemudian mengintegrasikan firma ini ke dalam kekuasaan perusahaan multinasional global. Seringkali tren ini bergerak ke ranah politik hingga mempengaruhi proses pemilihan pemimpin lokal khususnya walikota (Hall; 1988, 346).

Di Inggris, kasus masyarakat yang "terpinggirkan" oleh kapitalisasi kota ini mendapat perhatian dari Menteri Sekretaris Negara, Peter Walker pada tahun 1972. Dia meminta adanya investigasi terhadap kasus ini. Hasil dari laporan itu menunjukkan bahwa marginalisasi bukan hanya masalah individual atau rumah tangga yang tiba-tiba jatuh miskin, namun karena masalah kegagalan sistemik dari keseluruhan ekonomi kota. Oleh karena itu, kota inti mendapat prioritas utama untuk pengembangan kawasan industri baru; anggaran dari pemerintah pusat diharuskan dialokasikan ke kota-kota baru yang didirikan untuk menopang kota (lama); kemitraan pemerintah pusat dan daerah harus diintensifkan, terutama di daerah di kawasan metro yang paling terdampak krisis. Ini mengawali perubahan dari sistem perencanaan lama ke sistem perencanaan baru dimana isu politik mulai mendominasi pengambilan kebijakan. (Hall; 1998, 347) Di Indonesia umumnya, dan Kota Malang pada khususnya, pasca otonomi daerah, pertimbangan ekonomi-politik adalah pertimbangan utama dalam perencanaan kota. Penulisan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan komersial sangat dominan dalam perebutan atas ruang kota.

B. Permasalahan

Gejala seperti ini juga terjadi di Indonesia. Hampir semua kota di Indonesia terbentuk di bawah pengaruh perdagangan, khususnya sepanjang abad XV. Seiring dengan perkembangan frekuensi perdagangan di kawasan Asia Tenggara, di sepanjang Pantai Utara terbentuk kota-kota seperti Banten, Cirebon, Kudus dan Gresik. Perkembangan kota-kota ini terhenti pada era VOC ketika perdagangan dimonopoli oleh Perusahaan Dagang terbesar di dunia pada abad ke-17. Penetrasi VOC ke Jawa berdampak pada masuknya ekonomi kapitalisme ke Jawa. Ekonomi kapitalisme ini semakin meluas seiring dengan pembukaan Jawa untuk tanaman perdagangan. Kebijakan Gubernur Jendral Du Bus de Gisignies (1826-1830) yang

memberi izin untuk mengalihkan status tanah yang tidak berkepemilikan menjadi tanah negara telah membuka jalan perluasan lahan perkebunan secara masif. Setelah eksploitasi tanah dan penduduk oleh Pemerintah Kolonial menunjukkan hasil yang positif, kelompok swasta menginginkan keuntungan yang serupa. Semenjak tahun 1854, kelompok swasta mulai memperjuangkan kebebasan usaha di *Tweedekamer* (Parlemen) di Den Haag. Usaha ini akhirnya berhasil dengan keluarnya Undang-Undang Agraria 1870. Mulai pertengahan abad ke-19 inilah, karakter merkantilis dari Belanda berubah menjadi perusahaan kapitalis. Sebagai dampaknya adalah, terjadi penguatan posisi dari industri Belanda dan keuangan para pemodal, dan meningkatnya investasi di bidang sewa tanah, pembukaan, penanaman pembangunan pabrik dan perekrutan buruh upah. Undang-undang 1870 selain mengakhiri monopoli negara juga mengamankan kepentingan swasta (Robinson; 2009, 6-7). Hingga tahun 1930, telah ada 502 perusahaan swasta dan 70 perusahaan swasta yang bermitra dengan kerajaan yang bergerak di bidang industri perkebunan. Bersamaan dengan tumbuhnya kapitalisme di bidang pertanian, muncul pengakuan bahwa modal haruslah dibawah kendali, dan kebijakan *laisser faire* perlu ditinggalkan,. Pendapat itu muncul dari kalangan Tuan Tanah. Namun pendapat kaum konservatif itu tidak mampu membendung arus kapitalisme yang sangat kuat (Furnivall: 1944, 312-3).

Perkembangan ekonomi kapitalis ini mulai berpengaruh pada kota-kota yang berfungsi sebagai daerah simpul distribusi. Sejak awal kedatangannya pada abad XVII, Belanda telah meletakkan dasar-dasar masyarakat dan ruang kota dengan model Eropa. Setelah tahun 1875, sejumlah kota di pedalaman Jawa semakin berkembang seiring dengan pembangunan Jaringan Kereta Api. Kota-kota yang dilewati oleh jalur Kereta Api semakin ramai karena berfungsi sebagai simpul distribusi produk perkebunan dari pedalaman ke Pelabuhan. Stabilitas politik yang tercipta pasca usainya Perang Jawa pada tahun 1830 menyebabkan populasi di Pulau Jawa mengalami peningkatan. Di sisi lain perluasan lahan untuk perkebunan terjadi sangat masif setelah tahun 1870. Ini menjadikan Jawa sebagai penduduk terpadat di Hindia Belanda sekaligus paling modern di segala bidang. Pembukaan Jawa untuk

lalulintas perdagangan dunia membuat Jawa mengalami proses kapitalisasi yang luar biasa (Colombijn; 2009, 30).

Memasuki abad ke-20, penambahan populasi dari warga Eropa semakin cepat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi pada periode ini muncul gagasan-gagasan tentang pembentukan administrasi kota disertai dengan transfer kompetensi dari orang Belanda ke penduduk Bumiputera yang mulai menyebar pada tahun 1926. Kapitalisme yang menyebar pada periode tersebut - yang menuntut tenaga kerja murah dengan *output* maksimal, ternyata berdampak pada ini memunculkan elit modern di kalangan Bumiputera. Perkembangan ekonomi, transportasi, komunikasi dan media sebagai simbol modernitas telah memfasilitasi persebaran gagasan nasionalisme. Salah satu simbol kekuasaan lokal yang terbentuk adalah Dewan Kota.

Sekalipun Dewan Kota dianggap sebagai tanda meningkatnya tingkat otonomi daerah, dalam pelaksanaan dewan kota ini menjadi lambang dominasi Eropa di tingkat kota. Dewan kota itu lebih banyak memprioritaskan kepentingan penduduk Eropa dan mempertegas politika diskriminasi rasial di masyarakat Kota. Sebagai dampak, setiap anggaran yang disusun oleh Dewan kota selalu diprioritaskan untuk warga Eropa. Sebagai contoh, pengadaan penerangan, pengaspalan jalan, gorong-gorong dan air ledeng selalu ditempatkan sepanjang kawasan Eropa. Dalam sidang *Gemeenteraad* Malang, setiap usulan perbaikan dan pengadaan infrastruktur dalam penyusunan anggaran selalu ditujukan pada jalan-jalan di kawasan Eropa dan jarang sekali di kawasan Kampung. Perbaikan kampung tidak menjadi perhatian *Gemeente* hingga tahun 1938. Setelah Kongres Internasional Daerah Koloni di Paris pada tahun 1937, Pemerintah Kolonial baru memikirkan upaya perbaikan kampung dengan pembentukan *Comissie van Verbetering Kampong* yang merupakan organ Pemerintah Pusat (Hudiyanto: 2011, 151).

Kapitalisasi kota dimulai pada periode 1924 hingga 1931. Ini diawali pada tahun 1919, H. Bussemaker diangkat sebagai walikota pertama setelah 5 tahun *Gemeente* Malang dibawah pemerintahan asisten Residen. Ambisi pertama Bussemaker adalah memindahkan kantor *Gemeente* ke gedung baru yang merepresentasikan kebesaran kota. Empat tahun kemudian pemerintah pusat

menyetujui proposal *Gemeenteraad* Malang untuk mewujudkan ambisi tersebut. Persetujuan itu dilatar belakangi oleh faktor pertumbuhan penduduk, terutama warga Eropa di kota Malang yang sangat cepat (Lakeman; 1924, 34). Dasa warsa berikutnya dapat dianggap sebagai awal dari munculnya simbol-simbol kapitalisme di Kota. Jika pada pertengahan abad ke-19 simbol-simbol kapitalisme muncul di Desa dalam bentuk pabrik-pabrik maka di kota simbol kapitalisme itu mulai bermunculan. Beberapa gedung yang merepresenasikan gaya hidup dan kepentingan kapitalisme antara lain gedung De Javasche Bank, *Nederlandsch Indie Levenzekering Maatschappij*, *Societeit Concordia*, *Bioscoop Rex* dan Pusat pertokoan Kayu Tangan. Kawasan ini banyak menawarkan gaya hidup, dan kebutuhan hidup kelompok borjuasi perkotaan. Kondisi ini dipermudah dengan adanya Undang-undang Desentralisasi

Dalam konsep Desentralisasi 1903, setiap pemerintah lokal diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengurangi bantuan dan campur tangan pemerintah pusat di Batavia. Dalam pelaksanaan, pemerintah kota mulai mengaggap kota haruslah memiliki mesin yang dapat menghasilkan keuntungan. Dalam istilah Haal, kota telah berubah menjadi apa yang disebut sebagai *The City of Entreprise*. Pembangunan tidak hanya menghasilkan gedung dewan kota baru namun juga pasar, sekolah, kompleks olah raga, perumahan, rumah potong hewan dan juga ruas-ruas jalan baru yang dilengkapi dengan taman dan jalur hijau.

Malang dibangun atas dasar cetak biru yang merinci bagian kota menjadi 8 kawasan (*bouwplan*). Berikut ini adalah rincian *bouwplan* dan kawasan peruntukan. *Bouwplan* I mencakup kawasan antara Celaket dan Rampal. Kawasan ini disebut dengan *Orangebuurt*. Kawasan ini mulai dibangun pada tahun 1917 dan yang diperuntukan sebagai kawasan hunian elit. *Bouwplan* II mencakup kawasan antara Klojen Lor hingga sungai Brantas. Kawasan seluas 166.000 m² ini disebut dengan *Gouverneur-generaalsbuurt* dan diperuntukkan sebagai kawasan pendidikan, pemerintahan dan hunian. Daerah ini mulai dibangun pada tahun 1920. *Bouwplan* III meliputi kawasan Selatan kota di sekitar Kampung Sukun. Kawasan ini diperuntukkan bagi pemakaman Eropa. *Bouwplan* IV meliputi kawasan persawahan

Lowokwaru. Pada awal pembukaan di tahun 1917, pemerintah ingin menjadikan kawasan ini sebagai pemukiman warga Eropa. Tujuan ini dibatalkan karena munculnya keberatan dari warga di sekitar Lowokwaru. Dikemudian hari, kawasan ini tidak begitu diminati warga Eropa sehingga pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai Penjara Negara pada tahun 1921 (Lakeman; 1934, 44). *Bouwplan V* mencakup kawasan Talun. Kawasan ini diperuntukkan bagi perumahan warga Eropa kelas menengah-elit. Kawasan yang terletak di kampung Talun dan Oro-oroDowo ini dikembangkan pada tahun 1922 hingga 1931. *Bouwplan VI* meliputi kawasan selatan Kota antara kampung Mergosono dan Sukun. Kawasan ini dirancang dibawah penasehat ahli tata kota Ir Thomas Karsten. Beberapa petak dari kawasan ini digunakan oleh BPM¹, sekolah dan perumahan yang diusulkan oleh kelompok Indo Eropa. Hanya sebagian kecil kawasan yang diperuntukkan untuk rumah-rumah Bumiputra. *Bouwplan VII* mencakup kawasan yang merupakan perluasan dari Bulevard Ijen. Kawasan ini ditujukan untuk perumahan dengan harga berkisar antara f.4,5 hingga f.6 per meter persegi. *Bouwplan VIII* berada di kawasan perluasan kota di bagian selatan. Kawasan ini diperuntukkan untuk Industri. Penempatan kawasan industri ini berkaitan dengan posisi stasiun Kotalama dan *Malang Stoomtram*. Pada tahun 1931, NV Faroka membeli tanah seluas 21.000 m² untuk pendirian pabrik rokok. Menyusul Faroka, Perusahaan dagang dan Pabrik Oli Kian Hong membeli tanah di kawasan ini untuk penggilingan beras, pabrik minyak kacang dan kelapa. Pada tahun 1931 – 1932 *Gemeente* membangun emplasemen untuk bengkel, gudang senjata, markas pemadam kebakaran dan kandang ternak. Setelah kompleks itu terwujud, *Gemeente* mulai mencoba menutup modal yang dikeluarkan untuk pengembangan kawasan Villa itu melalui uang sewa, pajak tanah dan bangunan maupun penjualan listrik dan air.

Perkembangan simbol-simbol kapitalisme ternyata tidak hanya direpresentasikan ke bangunan-bangunan villa, namun juga mencakup segala infrastruktur penunjang gaya hidup kapitalis seperti kompleks olahraga, bioskop dan

¹ *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (Perusahaan Minyak)

merambah hingga kawasan publik yaitu reklame. Pada umumnya simbol kapitalisme identik dengan orang Belanda. Namun setelah era Kemerdekaan dan rekonstruksi pada periode 1950-1957, pertumbuhan dan produksi simbol itu mengalami stagnasi. Pelayanan masyarakat sempat mengalami kemunduran. Sebagai contoh terjadi penurunan jumlah armada pengangkut sampah sehingga terjadi penumpukan sampah di beberapa tempat (*Jawa Pos*, 2 Mei 1953). Menurut Colombijn terjadinya penurunan kualitas kota disebabkan negara yang baru itu belum sempat memperbaiki sistem perpajakan yang "rusak" selama pendudukan Jepang dan Revolusi. Di sisi lain kehidupan politik periode 1950-1956 masih berimbas pada pemerintah di tingkat daerah. Pengambilan keputusan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat kota disibukkan oleh persetujuan politik antar partai yang membuat anggaran tidak tersalurkan ke sektor produktif namun mengalir ke sektor non produktif (Colombijn: 2009, 34). Kebijakan politik pasca Nasionalisasi Perusahaan Belanda para tahun 1957 dan konflik Irian Barat menyebabkan arah politik Pemerintahan Soekarno lebih condong ke arah Negara Blok Timur. Ini tercermin pada produksi simbol-simbol kota lebih didominasi simbol yang mengandung ekspresi gagasan "Indonesianisasi" Soekarno yang memadukan tradisional dan modernitas (Kusno: 2000, 52-53). Kedekatan Presiden Soekarno dengan negara-negara berhaluan sosialis-komunis seringkali diekspresikan pada patung-patung di Jakarta yang bergaya Stalinis.

Kondisi tidak berubah hingga tahun 1969 ketika DPRGR Kota Malang mulai mencanangkan Indonesianisasi dan semangat memberantas semua bentuk ajaran komunis – yang oleh beberapa akademisi dianggap lebih mengarah ke militerisasi. Angkatan Darat – yang bekerjasama dengan kelompok kapitalis China, mulai menyusun simbol-simbolnya. Simbol-simbol ini terus diproduksi hingga tahun 1980an ketika Kapitalisme mengalami masa kejayaan dalam bidang pendanaan ke Pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Kejayaan simbol-simbol kapitalisme terus berlanjut hingga memasuki abad ke-21

Pada tahun 2009, sebuah pusat perbelanjaan megah berdiri di tengah kota Malang. Otoritas kota berharap, keberadaan mal tersebut akan mengundang investor untuk menanamkan modal usaha. Keberadaan mal itu akan memperbesar peluang

peningkatan perolehan pajak dan parkir. Malang akan memiliki fasilitas wisata belanja dan hiburan yang akan memenuhi kebutuhan kelas menengah di kota ini. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa pembangunan pasar modern tersebut telah menggusur sebuah kolam renang yang dibangun pada era kolonial Belanda. Tidak terdengar adanya upaya maksimum dari otoritas kota untuk melindungi *cultural heritage* itu dari terjangan kekuatan kapitalisme pasar bebas. Padahal fasilitas kolam renang dan kompleks olah raga itu sangat berperan dalam membentuk citra kota Malang sebagai kota tujuan berlibur dan pendidikan pada era kolonial Belanda. Peristiwa penggusuran kolam renang itu telah memperpanjang riwayat penghancuran situs kolonial menyusul gedung Societeit Concordia, Bioskop Grand, Pasar Besar dan Hotel Mabes.

Pada era pasar bebas, dan kemajuan teknologi informasi, sebagian besar pemegang kebijakan di Kota cenderung berpikir dan berorientasi ke pasar dan melupakan aspek *local wisdom* dan *sustainable environment*. *Environment* di dalam konsep ini tidak hanya terbatas pada lingkungan alam namun juga lingkungan sosial budaya. Kota merupakan salah satu cerminan lingkungan sosial budaya yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Simbol-simbol kehadiran kekuatan kapitalisme itu terus direproduksi sepanjang periode. Ini menjadi benang merah dalam penelitian ini. Bagaimana dinamika simbol-simbol kapitalisme di kota Malang. Apa saja bentuk yang merepresentasikan kapitalisme dan seberapa jauh kekuatan pengaruh kapitalis dalam konstruksi simbol-simbol di perkotaan dari tahun 1930 hingga 2010.

C. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini terfokus pada tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana awal kemunculan dan persebaran simbol-simbol kapitalisme di kota Malang?

2. Bagaimana interaksi yang terjadi antara simbol-simbol kapitalisme dan simbol tradisional di kota Malang sejak tahun 1930 hingga tahun 2010?
3. Mengapa simbol-simbol kapitalisme selalu memenangkan kompetisi perebutan ruang di Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat arti penting penguasaan simbol dalam pembentukan citra kota. Oleh karena itu, tujuan penelitian dapat dielaborasi pada beberapa point dibawah ini

1. mendeskripsikan kemunculan dan persebaran simbol-simbol kapitalisme di kota Malang
2. menjelaskan interaksi antara simbol-simbol kapitalisme dan tradisional di kota Malang sejak tahun 1930 hingga 2010
3. menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan adanya dominasi simbol-simbol kapitalisme di Kota Malang
4. mengungkap nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam perkembangan simbol-simbol kapitalisme di kota Malang

E. Metode dan Langkah Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah kota dengan prespektif ekonomi. Salah satu latar belakang penggunaan perspektif ekonomi disebabkan karena kata kunci dalam perubahan ini adalah komersialisasi dan kapitalisasi. Dua kata itu adalah konsep dalam ilmu ekonomi. Sebagai sebuah metode, metode sejarah memakai empat langkah penelitian yaitu pengumpulan sumber informasi; kritik ekstern dan intern; interpretasi dan sintesis dan tahap terakhir adalah penulisan. Sesuai dengan judul, maka penelitian ini menggunakan pendekatan simbolik. Oleh karena itu, penelitian ini banyak menggunakan ilmu penunjang yaitu antropologi. Kedua, penelitian ini memiliki cakupan waktu yang cukup panjang. Batas akhir dari yang tidak terput cukup lama (*recent time*) sehingga akan memaksimalkan penggunaan surat kabar.

Dalam pelaksanaan, kegiatan penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah observasi lapangan dan sumber. Dalam tahap kegiatan ini, peneliti melakukan pengamatan awal terhadap lokasi penelitian, dan keberadaan sumber baik sumber pustaka, informan maupun benda. Hasil dari pengamatan ini akan dijadikan pedoman penyusunan strategi penjadwalan kegiatan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil kegiatan lapangan, tidak banyak informasi yang dimiliki oleh pemerintah kota Malang untuk kegiatan sektor ekonomi pada periode 1980-1990. Catatan yang dimiliki oleh pemerintah kota hanya sampai pada tahun 2013. Oleh karena itu, penelitian ini banyak memanfaatkan sumber surat kabar Jawa Pos. Peneliti sangat berterima kasih pada Perpustakaan Nasional yang menyimpan koleksi surat kabar Jawa Pos dari tahun 1977 hingga tahun 2014.

Tahap penelitian kedua berupa kegiatan lapangan. Kegiatan di lapangan ini berupa pengumpulan sumber. Dalam penelitian yang menggunakan objek peristiwa sosial yang telah terjadi pada masa lampau, keberadaan sumber menjadi sebuah kebutuhan mutlak. Oleh karena itu, tahap ini merupakan tahap yang paling berat di dalam penelitian ini. Informasi-informasi banyak ditemukan di sumber Pemerintah Kota Malang, *Malang Corruption Watch*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, . Informasi tentang nama kampung pertama dapat diperoleh dari berbagai laporan pemerintah atau laporan pejabat lokal tentang situasi di daerahnya. Laporan ini dapat dilacak sejak dari era Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Informasi tidak hanya terbatas pada dokumen namun juga pada memori dari beberapa informan terkait. Sementara itu, kekuatan simbol ditelusuri melalui penjarangan informasi dengan daftar pertanyaan yang dibagikan pada 40 orang informan yang berasal dari kota-kabupaten Malang.

Langkah terakhir dalam penelitian lapangan setelah pengumpulan sumber adalah kritik. Kritik dilakukan terhadap dua hal yaitu materi dan substansi. Materi terdiri atas bahan dimana sumber itu direkam seperti kertas, lembaga yang mengeluarkan sumber, dan integritas seorang saksi/informan jika sumber tersebut berupa *oral fact*.

Tahap ketiga adalah pengorganisasian hasil temuan. Dalam tahapan ini, semua data yang terkumpul dipilah-pilah berdasar masa sumber itu diproduksi. Selanjutnya berbagai fakta itu digabungkan dengan analisa kausalitas maupun fungsional. Ini dengan pertimbangan pemilihan sebuah nama memiliki alasan-alasan tertentu (*causalitas*). Disamping alasan yang bersifat kausalitas, pemilihan nama memiliki makna fungsional. Langkah terakhir adalah penyajian. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi analisis. Kegiatan penelitian dilangsungkan di luar ruangan dan di dalam ruangan. Penelitian sosio humaniora memiliki perbedaan dengan ilmu alam yaitu tidak ada kegiatan eksperimen di laboratorium. Sekalipun demikian penelitian ini dilakukan di dalam maupun luar

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut, langkah pertama, berupa observasi sumber, perumusan metode-strategi penelitian, persiapan kelengkapan penelitian seperti komputer jinjing, kamera digital, perekam digital, *scanner*, transportasi-akomodasi ke daerah dimana sumber berada. Tahapan ini akan memakan waktu sekitar satu bulan.

Tahapan kedua adalah terkait dengan perijinan ke lembaga-lembaga instansi terkait. Pada tahap ini perijinan sangat diperlukan sebagai salah satu syarat penting untuk pengumpulan sumber yang ada di lembaga-lembaga instansi terkait. Hal tersebut sesuai dengan judul penelitian yang terkait dengan perkembangan kota dan pertumbuhan jumlah pasar modern, hypermart, lembaga finansial, dan bioskop modern.

Tahapan ketiga adalah adalah pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data-data tersebut berupa sumber pustaka, surat kabar dan laporan resmi pemerintah kota. Khusus untuk informasi tentang perkembangan perusahaan sebelum tahun 1980an, peneliti mengandalkan sumber arsip dan laporan tahunan. Disamping itu, penelitian ini banyak dibantu dengan informasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan HUMAS Pemerintah Kota. Sementara itu, khusus untuk merekonstruksi perkembangan pasar dan ruang komersil sebelum tahun 1992, penulis banyak

mengandalkan pada sumber surat kabar. Sumber surat kabar itu antara lain, Jawa Pos, Umum, Terompet Masyarakat dan Pewartas Surabaya.

Tahapan Keempat adalah Sintesis. Kegiatan yang dilakukan berupa menyusun informasi yang ditemukan di lapangan kemudian memberikan rasionalitas diantara informasi-informasi tersebut. Interpretasi dilakukan untuk memberikan penjelasan atau alasan rasional atas keterkaitan fakta satu dengan fakta lain. Tahapan Lima adalah penyusunan laporan. Pada tahapan ini, semua hasil temuan di lapangan diterjemahkan, diinterpretasi, diorganisasi dan disusun menjadi sebuah draft hasil penelitian. Di dalam penyusunan buku ini diperkirakan waktu yang diperlukan untuk penyusunan hasil penelitian ini adalah 4 bulan.

F. Target Penelitian/Keluaran

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk buku teks ber ISBN. Adapun buku teks itu diharapkan dapat dijadikan bahan pengayaan untuk mata kuliah Sejarah Kota, Sejarah Sosial, Sejarah Ekonomi dan Sejarah Indonesia Kontemporer.
2. Hasil penelitian ini berupa artikel yang akan diajukan untuk dimuat di Jurnal Internasional berindeks copernicus

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kapitalisme dan Imperialisme

Penelitian tentang kapitalisasi kota dari perspektif sejarah masih sangat jarang dilakukan. Bahkan dalam penelitian terbaru yang dimuat dalam buku *Car Conduit and Kampongs: The Modernization of The Indonesian City 1920-1960* - yang merupakan karya editorial Freek Colombijn dan Joost Cote, kajian tentang simbol kapitalisme tidak mendapat perhatian khusus (Colombijn and Cote; 2011, 323). Sebagian besar tulisan lebih menyoroti simbol-simbol kolonial di kota-kota pasca dekolonisasi. Penelitian ini menggunakan kata kunci Kapitalisme perkotaan. Untuk menjelaskan konsep Kapitalisme maka perlu diketahui awal mula perkembangan kapitalisme.

Dalam rangka menguraikan problematika dominasi kapitalisme, penulis mendapatkan deskripsi yang cukup kronologi dalam buku *Imperialism and Global Political Economy* karya Alez Callinicos (Callinicos; 2009, 20). Menurut Carlo Cipolla, Kapitalisme berkembang di Eropa pada akhir abad pertengahan. Ekonomi abad pertengahan sangat statis dan ditandai dengan konsumsi yang sangat tinggi di satu sisi dan *saving*/tabungan yang sangat tipis atau rendahnya nilai investasi. Fase ini berlangsung antara tahun 1000-1400 M. Pada fase Kedua terjadi pada kurun tahun 1400-1700 M. Pada periode itu terjadi dinamika politik yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk, inovasi teknologi, bisnis dan perubahan geopolitik yang telah membuka jalan bagi revolusi industri (Cipolla; 1980, 320).

Kajian tentang kemunculan kapitalisme juga dibahas dalam literatur yang merupakan karya editorial dari James D Tracy lain berjudul *The Political Economy of Merchant Empire: State Power and World Trade 1350-1750*. Dalam salah satu artikel di buku ini dibahas permasalahan adalah mengapa kapitalisme berkembang di Eropa, bukan di belahan dunia lain. Menurut North, kunci keberhasilan perkembangan kapitalisme di Eropa terletak pada kemampuan lembaga dalam

menjaga efisiensi dan konsistensi ketika menekan biaya transaksi, produksi dan transportasi. Kedua, lembaga keuangan memiliki strategi dalam meningkatkan produksi secara berkelanjutan. Inilah juga menjadi kunci dari keberhasilan British sekedar kerajaan Anglo-Saxony kecil menjadi sebuah *Seaborne Merchant Empire*. Ada prasyarat supaya system ini bisa berjalan antara lain adanya pengakuan atas hak-hak milik perorangan. Dibelahan dunia lain proses ini gagal karena adanya ancaman, anarkis, otokrasi dan pengingkaran terhadap hak-hak individu. Di Eropa pada awal era modern, ada pertumbuhan secara perlahan berupa spesialisasi, pembagian kerja, dan terbentuknya lembaga yang berkaitan dengan kontrak perdagangan dan pengenalan pola perdagangan, ada dua yang berpengaruh pertama dalam skala ekonomi yang meningkat seiring peningkatan volume perdagangan dan kedua metode kontrak yang dipaksa terus berkembang (Douglas C North; 1991, 239).

Kapitalisme mulai mendunia pada abad ke-19. Ini berjalan seiring dengan liberalisasi ekonomi, transformasi menuju negara industri, evolusi dari *city state* menjadi *nation state*, berbasis nilai demokrasi dan ditopang jaringan ekonomi multinasional. Kapitalisme ini kemudian menjadi kekuatan dominan. Menurut Dobb dalam *Studies in development of capitalism* (1946) dominasi diawali sejak dari perubahan sistem politik di Eropa. Pada akhir abad XV terbentuk penguasa oligarki yang terdiri dari pedagang. Mereka telah mendominasi kota-kota di periode modern awal Eropa. Di kota itu juga terdapat sistem serikta pekerja dimana ini menjadi penghalang perkembangan dari produksi kapitalisme sehubungan dengan eksploitasi upah buruh. Perubahan yang cukup menentukan berasal dari kelahiran kelompok kapitalis menggantungkan usahanya pada buruh bayaran daripada mengerjakannya sendiri. Mereka sangat berorientasi pada keuntungan dari modal perusahaan daripada miliknya sendiri. Ini menjadi awal perkembangan pasar. Perkembangan pasar merupakan penyebab utama dari kemunduran feodalisme yang merupakan kekuatan *status quo* Eropa pada saat itu. Pendapat lain menyebutkan bahwa akumulasi modal merupakan inti dan kekuatan awal yang menumbuhkan sebuah pusat kekuatan politik baru yang kemudian melebarkan sayap ke seluruh dunia Ini bukanlah seperti *city state* ataupun *nation state*, namun merupakan sebuah sistem mendunia karena

mencakup seluruh dunia memiliki batas unit politik yang sangat luas dengan ekonomi sebagai spiritnya. Ini membentuk sebuah jaringan internasional perdagangan pasar (Pearson; 1991, 106-105)

Wallerstein punya pendapat lain, dia menganggap bahwa esensi dari kapitalisme adalah kombinasi antara buruh upah di perkotaan dan buruh paksa untuk pekerjaan kasar di pedesaan. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang dikembangkan dalam dialog dalam tulisan Frank Braudel. Braudel menganggap bahwa ekonomi merupakan inti dari dan struktur hirarkis dimana kunci pemisahan pada geografis, Inti – pertengahan – pinggiran. Secara tegas dia memisahkan antara kapitalisme dan ekonomi pasar. Menurutnya pasar membentuk dialog yang berinti pada suplai, demand dan harga. Dalam pandangan Braudel kapitalisme mencoba memaksimalkan keuntungan melalui monopoli. Dalam sejarah, hak-hak istimewa (monopoli) ini tidak terletak produksi namun pada sirkulasi. Sebagai contoh dalam sistem perdagangan abad ke-15 hingga abad-18 spekulasi keuangan merupakan fenomena yang berulang kali terjadi di dunia. Hubungan ekonomi trans nasional merupakan entitas sesungguhnya dari kapitalisme

Dalam sistem ekonomi pra-kapitalisme, pasar tidak pernah berkembang disebabkan oleh karakter hubungan antara produsen, dan pemakai. Dalam sistem ekonomi pra-kapitalisme, baik produser maupun *eksploter* punya akses langsung kepada sarana subsisten. Ini menyebabkan antara produser dan *eksploiter* (pemakai) tidak berada di bawah tekanan sistematis untuk menambah pemasukan mereka melalui pengenalan metode produksi baru yang akan meningkatkan produktivitas. Dalam aplikasi lebih lanjut sistem kapitalisme sering berdampak para pemakai tenaga kerja memeras tenaga kerja dan sumber alam demi meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, perkembangan Kapitalisme tidak bisa dipisahkan dari imperialisme.

Sebagai sebuah sistem ekonomi yang menuntut pertumbuhan modal dan pasar, sistem ini membutuhkan pasar baru. Salah satu pintu masuk untuk meluaskan pasar adalah imperialisme. David Harvey menyebut bahwa ada dua tipe imperialisme, imperialisme klasik dan imperialisme baru. Imperialisme. Proses akumulasi modal yang tidak terbatas membutuhkan struktur politik yang juga ditopang kekuatan yang

tidak terbatas yang dapat melindungi properti yang terus tumbuh secara konstan. Dalam suatu pendapat, Harvey mengatakan bahwa Imperialisme Kapitalisme memiliki sifat yang mendorong ekspansi wilayah yang tidak terbatas. Namun ini ternyata keliru, Imperium British telah meluaskan wilayah yang cukup besar pada akhir 1919, namun ternyata imperium ini mendapatkan kesulitan yang justru muncul dari imperialisme Amerika. Oleh karena itu, kapitalisme imperialisme merupakan sebuah titik temu dari kompetisi ekonomi dan penguasaan wilayah.

Dalam sejarah, imperialisme kapitalisme dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah yang disebut sebagai Imperialisme klasik (1870- 1945). Fase kedua disebut sebagai imperialisme superpower (1945-1991) ini ditandai dengan dunia yang terbagi berdasarkan geopolitik dan ideologi antara dua blok, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Fase ketiga adalah imperialisme pasca perang dingin, (Periode setelah tahun 1991). Fase ini ditandai dengan supremasi Amerika dan perubahan disetribusi kekuatan ekonomi yang terjadi secara global.

Bagaimana dengan perkembangan Kapitalisme di Indonesia? Sejarah Kapitalisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi di Eropa. Sejak abad ke-15 di Kawasan laut Tengah terjadi kecenderungan melemahnya sistem feodalisme dan menguatnya sistem kapitalisme. Perkembangan serikat dagang di Eropa pada kurun 1400-1600 telah berdampak pada munculnya kelompok bangsawan-pedagang (*merchant-princes*) yang akan mendominasi beberapa serikat dagang besar di Eropa. Pada umumnya mereka memperdagangkan produk yang memiliki harga jual yang tinggi, rempah-rempah. Akan tetapi setelah jalur darat dikuasai oleh Turki pada periode tersebut, orang Eropa harus mencari jalan alternatif, yaitu laut. Ini menjadi awal era penjelajahan samudera. Pada awalnya, Portugis merajai jalur laut dari Eropa, Afrika, Teluk Persia, India hingga Malaka. Akan tetapi setelah hampir 150 tahun menjadi imperium samudra, Portugis mulai meredup, digantikan oleh VOC. VOC merajai perdagangan laut dunia dari tahun 1621 hingga tahun 1789. VOC merupakan sebuah perusahaan multi nasional pertama di dunia sekaligus memperkenalkan sistem kapitalisme di Hindia Belanda. Batavia merupakan pusat dari kapitalisme di Asia bahkan setelah

kebangkrutan VOC pada tahun 1798. Setelah melalui tahun-tahun ketidakpastian dari 1799 hingga 1819, sistem kapitalisme di Hindia Belanda mulai dijalankan kembali disertai dengan kombinasi sistem tradisional Jawa. Prinsip kapitalisme sangat menuntut aplikasi dari kebijakan liberal. Kebijakan liberal ini telah dirintis semenjak kepemimpinan Dirk van Hogendorp. Prinsip dari Hogendorp adalah sistem ekonomi politik yang berpegang pada 5 prinsip. Kepemilikan tanah individu, kebebasan setiap orang, kebebasan untuk berdagang, penghapusan buruh wajib dan penyusunan sebuah sistem hukum yang bagus, imparial dan tidak mahal. (Furnivall: 1944, 58) Sistem kapitalisme yang direpresentasikan oleh kalangan swasta mulai berakhir pada tahun 1958. Ekonomi Banteng, semangat untuk melucuti nilai-nilai kolonialisme menyebabkan pemboikotan hingga pengusiran Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Ini menyebabkan kondisi perekonomian merosot karena struktur sosial dan politik pra-kapitalis di Indonesia telah digerosoti oleh ekonomi uang, komoditi dagang, dan negara kolonial tanpa menciptakan sistem buruh upah, kelompok pemilik tanah yang terorganisir dengan baik (Robinson: 2009, 37). Hilangnya perusahaan-perusahaan Belanda yang menjadi pondasi ekonomi negara Indonesia selama bertahun-tahun menyebabkan menurunnya daya saing ekspor Indonesia setelah tahun 1957.

B. Perkembangan Kota

Kota merupakan sebuah bentuk organisasi manusia yang sangat rentan dengan perubahan. Kota dapat binasa dalam waktu singkat, namun dalam waktu singkat pula kota akan mengalami *recovering* (pemulihan). Setidaknya ini dapat dibuktikan pada kota Northridge Los Angeles, Mexico City, Kobe dan Ahmedabad, Si Chuan pasca gempa bumi hebat. Kota juga sebuah organisasi manusia yang sangat lemah terhadap perubahan. Salah satu kekuatan pendorong perubahan itu adalah kapitalisme. Kapitalisme dikatakan sebagai kekuatan yang menunjukkan *chronic habits od creative destruction*. (kebiasaan penghancuran kreatif yang kronis). Modernisasi yang berjalan seiring dengan pola konstruksi kota diiringi dengan

”kanker yang menjalar” dalam bentuk asap polusi, penurunan kualitas lingkungan, dan pembinasaan beberapa spesies makhluk hidup (Harvey: 2003, 25-26).

Dalam kondisi ekonomi seperti tersebut diatas, kota-kota Indonesia mengalami sebuah dinamika yang disebabkan oleh kekuatan eksternal yang luar biasa, kapitalisme. Hampir semua kota Indonesia sekarang – terutama kategori Kotamadya, ini dibangun di atas pondasi ekonomi kolonial yang dijiwai oleh ekonomi kapitalisme. Bahkan pilihan posisi ibukota Negara kita juga masih mewarisi pemerintah kolonial Belanda. Hanya ibukota negara yang mengalami perkembangan pada periode pasca 1960an. Menjelang tahun 1970an, kajian perkembangan kota mengalami kemunduran, seiring dengan kebijakan politik rezim saat itu yang sangat membatasi persebaran ide-ide yang berkembang di ilmu sosial.

Kajian terhadap kehidupan perkotaan, terlebih lagi periode pasca 1980an masih belum banyak dilakukan. Semenjak dipelopori oleh Peter Nas, Kees Grijns dan Freek Colombijn, tidak banyak kajian sejarah kota. Sekalipun demikian, selama 5 tahun terakhir ini telah ada disertasi tentang sejarah kota seperti yang dilakukan Reza Hudyanto (2009) dan Purnawan Basundoro (2011). Peter Nas menyusun sebuah periodisasi perkembangan kota-kota di Indonesia. (Nas; 1986, 5) Periode pertama adalah kota Tradisional, yaitu kota-kota yang terbentuk pada era Periode Hindu era Perdagangan Asia Tenggara (abad ke-15 hingga awal abad ke-17). Contoh kota tradisional yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini adalah Cirebon, Banten, Tuban, Lasem, Pasuruan, Pasai, Malaka, Yogyakarta dan Surakarta. Periode ke dua adalah periode Kota Indis. Kota ini didominasi oleh elemen kebudayaan campuran antara Jawa dengan Belanda. Jakarta, Surabaya, Semarang, Rembang dan beberapa kota di Pedalaman lain adalah contoh dari kota Indis. Kedekatan sosial yang dibangun atas dasar perkawinan antara pejabat Belanda dengan wanita lokal, Jawa dan Sunda telah menyebabkan munculnya kelompok masyarakat campuran yang disebut masyarakat *indisch*. Kebudayaan campuran Belanda – Jawa ini juga menghasilkan produk gaya hidup, dan gaya arsitektur tersendiri (Djoko Soekiman; 2000).

Kota periode ketiga adalah kota Kolonial. Kota ini berkembang dari tahun 1870-1930. Ada beberapa faktor yang menyebabkan yang menyebabkan

perkembangan kota kolonial. Faktor- faktor itu antara lain pembukaan Terusan Suez yang telah “memperpendek” jarak Belanda dan daerah Jajahan di Timur. Faktor kedua adalah prestasi di bidang kedokteran tropis yang membuat daerah Hindia tidak lagi menjadi tempat yang tidak berbahaya bagi migran Eropa. Faktor ketiga adalah politik pasifikasi yang telah berhasil hingga pertengahan tahun abad XIX, khususnya di Pulau Jawa. Keempat adalah keberhasilan pengembangan industri perkebunan yang diperkuat dengan kebijakan ekonomi yang bebas terhadap investor asing. Faktor-faktor itu menyebabkan peningkatan jumlah wanita Eropa yang berkunjung ke Hindia Timur. Kedatangan mereka semakin menekan jumlah praktek perkawinan antara pria Belanda dan Perempuan lokal. Ini berdampak pada perubahan orientasi budaya yang tidak lagi pada dominasi indis namun lebih berorientasi ke Belanda. Perubahan orientasi budaya dari *indisch style* ke *Dutch-oriented style* telah berdampak pada karakter kota. Arsitektur, pengelolaan ruang, fasilitas dan berbagai infrastruktur semakin mengarah ke pembentukan miniatur kota Eropa di daerah tropis Hindia. Dunia Timur dan Barat semakin terpisah, terutama dari segi ruang sosial (Stevens; 1986, 57-61).

Periode ke empat adalah kota Modern. Menurut Peter Nas, kota modern tercermin pada kota-kota yang terbentuk pada era pemerintahan Orde Baru. Karakter kota modern ini dapat dilihat dari kelengkapan infrastruktur, pola migrasi dan persebaran wilayah kota. Menurut Colombijn, sekalipun penguasa kolonial sudah angkat kaki dari Indonesia pada tahun 1950, pola segregasi ruang yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda ternyata masih dilanjutkan oleh pemerintahan Republik. Ketidakmampuan pemerintah Republik pada masa awal kemerdekaan untuk mencetak sebuah model kota Indonesia merupakan penyebab bentuk segregasi kota kolonial justru dilanjutkan oleh pemerintahan Republik pasca Dekolonisasi.

Pembahasan tentang kota-kota di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari periode kolonial Belanda. Dapat dikatakan bahwa periode ini merupakan peletak dasar peradaban kota modern di Indonesia. Pertama pada periode kolonial, kota tidak lagi sekedar ruang hidup dari tiga kelompok masyarakat yang tersegregasi berdasarkan perbedaan ras namun dijadikan sebagai *body of politics*. Barangkali

adalah praduga yang masih terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan bahwa beberapa di beberapa kota, transformasi berlangsung di bawah kontrol dari tokoh atau rezim tertentu. Harvey memberikan contoh Haussman yang mempengaruhi kota Paris, Niemeyer Brassilia, Moses New York atau partai politik tertentu seperti Daley di Chicago dan Lee Kuan Yew di Singapore (Harvey; 2003, 28). Perkembangan kota kolonial tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem ekonomi dan politik yang terjadi pada awal pertengahan abad XIX. Sistem kapitalisme yang digunakan dalam menggerakkan ekonomi di Hindia Belanda telah menciptakan sebuah titik-titik eksploitasi dan dominasi di Hindia, baik di pesisir maupun pedalaman. Pendapat dari Terrence McGee menopang teori tersebut. Dia mengatakan bahwa ciri kota kolonial adalah pusat eksploitasi produk-produk yang menjadi sumber keuntungan ekonomi pemerintah kolonial, sekaligus pusat pertemuan antara pedagang lokal dan asing (Mc Gee; 1969, 52).

Kajian kota dalam periode kontemporer lebih banyak dilakukan oleh sarjana Geografi. Salah satu penulis yang banyak memberikan interest pada isu perkotaan adalah Hadi Sabari Yunus. Dalam salah satu tulisan Yunus mencoba meninjau kota dari karakter pertumbuhan. Menurut Yunus, dari perspektif ini kota dapat dibagi menjadi dua yaitu generatif dan parasit (Yunus; 2008,77-78). Kota generatif adalah kota yang tumbuh secara alami. Dalam hal ini kota tumbuh karena faktor-faktor alami yang mendukung. Kota Parasitis adalah kota yang berkembang karena adanya unsur dari luar yang mencangkok dan mempercepat pertumbuhan kota. Di satu sisi kekuatan ini memperbesar kota dan memperkaya negara lain, di sisi lain kota menghisap sumber daya alam, dan manusia yang berada di kawasan sekitar kota. Teori kota parasit ini lebih tepat diaplikasikan untuk kota kolonial. Akan tetapi, sebelum membahas kota kolonial, orang harus terlebih dahulu mengetahui proses perkembangan sistem ekonomi politik yang menjadi faktor pendorong transformasi sebuah kota.

C. Simbol Kota

Simbol adalah bagian terpenting dari identitas kebudayaan. Sebagai contoh, identitas orang Betawi di Jakarta diperkuat dengan simbolisasi baju, bahasa dan rumah mereka. Peci, kaos oblong putih, kain sarung yang diikatkan di pinggang dan celana panjang hitam sedikit di atas mata kaki, merupakan identitas yang melekat pada diri Si Pitung, legenda orang Betawi. Atribut di atas merupakan sebagian kecil dari simbol-simbol yang menghiasi kota. Simbol mengandung muatan yang dapat dimaknai secara berbeda oleh kelompok yang berbeda. Dalam beberapa kutipan, Peter Nas mengemukakan makna simbol. Simbol berhubungan dengan makna yang melekat pada (sebuah objek) yang terkait dengan gagasan-gagasan tertentu. Ada perbedaan antara gambar dan simbol. Sebagai contoh potret dari orang yang tidak dikenal adalah gambar, bukan simbol karena potret itu tidak terkait dengan nilai yang berasal dari luar (potret). Sementara itu, patung selalu simbol karena patung bukanlah gambaran murni, namun selalu berkaitan dengan gagasan-gagasan tertentu. (Nas: 1993, 14).

Dalam penelitian tentang kota Jakarta, Peter Nas mempertegas konsep simbol dengan beberapa kriteria seperti bentuk, elemen, domain, kekuatan, ekologi, tingkatan, pemaknaan, dinamika dan fungsi. Berdasarkan bentuk, simbol dapat berupa pating, lagu, lukisan dan puisi. Berdasarkan elemen, simbol – patung misalnya, dapat dibedakan menjadi ukuran besar, sedang dan kecil. Berdasarkan domain, simbol dapat dibedakan menjadi simbol di bidang ekonomi, politik, pertahanan, pendidikan maupun budaya. Berdasarkan kekuatan, simbol dapat dibedakan menjadi simbol yang memiliki kekuatan yang kuat, tentu saja kekuatan itu berdasarkan kesan yang dibuat oleh warga. Berdasarkan tingkatan ada simbol yang dibuat dalam level internasional, nasional, bahkan tingkat Kampung. Berdasarkan makna, simbol bisa jadi memiliki makna formal dan informal. Makna formal pada umumnya diekspresikan pada prasasti yang menerangkan tujuan pembangunan sebuah monumen atau patung. Simbol juga memiliki fungsi antara lain sebagai instrumen komunikasi, dan legitimasi kepemimpinan. (Nas: 1993, 16) Fungsi simbol sebagai instrumen komunikasi dan legitimasi ini sangat menonjol di beberapa kota. Di Kota

Malang, beberapa patung figur militer ditempatkan di lokasi dimana banyak aktivitas berlangsung di sekitar lokasi patung.

Belum terlalu banyak tulisan yang menggunakan perspektif simbolis dalam kajian perkotaan. Beberapa kajian yang telah dilakukan dengan pendekatan simbolik masih berupa artikel dalam karya editorial. Beberapa contoh diantaranya adalah tulisan dari Peter J.M. Nas yang mengkaji tentang penempatan patung dan monumen nama jalan di kota Jakarta. (Nas: 2003, 17-32) Beberapa tulisan lain yang menggunakan kajian simbolik adalah karya Abidin Kusno dan Kees Van Dijk. Setelah mengadakan review terhadap beberapa penulisan yang sudah dilakukan oleh para sarjana, belum ada kajian tentang simbol kapital di kota Malang. Sehingga ini menjadi alasan dipilihnya tema ini menjadi judul penelitian.

BAB III PAPARAN DATA

A. Pemberlakuan Ekonomi Liberal di Wilayah Malang

Dalam kajian sejarah ekonomi, perkembangan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem ekonomi berbasis pasar. Pasar bebas yang sebenarnya telah memiliki dasar semenjak abad ke-15 telah berkembang dengan pesat seiring era penaklukan bangsa Eropa terhadap bangsa Asia. Perkembangan ini diawali dengan kedatangan sekelompok kecil pedagang Belanda yang diorganisasikan dalam *Vereenigde Oost Indische Compagnie*. VOC merupakan perusahaan yang ditopang oleh gabungan investor beberapa perusahaan dagang di Belanda ini menjadi peletak dasar perekonomian berbasis kapitalisme di Hindia. Kesepakatan untuk menghindari persaingan antar perusahaan dagang – yang sering kali diwarnai rivalitas antar baron (bangsawan).

Secara perlahan, perusahaan yang punya hak-hak khusus itu meluaskan kekuasaan dengan penaklukan militer, aliansi politis dengan raja lokal dan perjanjian keuangan yang memaksa penguasa lokal untuk memberkan hak-hak monopoli penjualan tanaman komersil dan memberikan hak-hak pengelolaan tanah dan memasok tenaga kerja. Keinginan untuk menguasai produksi dan distribusi rempah menjadi motif utama mereka. VOC yang semula merupakan sekelompok orang yang lebih banyak beraktivitas di lautan telah berubah dengan lebih banyak melakukan kegiatan di darat dengan memperluas produksi tanaman komersil. Pada tahun 1713, untuk pertama kalinya VOC mengangkut 2000 *pounds* kopi dari Jawa. DI saat harga kopi jatuh dan harga lada melonjak, Kumpeni menyuruh penduduk mencabuti tanaman kopi untuk diganti dengan lada. Ini menjadi awal bentuk investasi dan penerapan sistem ekonomi pasar di dunia Timur (Furnivall;1944, 67).

Hingga abad ke-19, sekalipun orientasi perdagangan tanaman komersil di Kepulauan Hindia mulai berubah mengarah ke perdagangan dunia, sistem politik di sebagian besar kepulauan di Nusantara masih menganut model lama. Hubungan antara penguasa dan rakyat masih bersifat patron client. DI bidang ekonomi

hubungan transaksi masih berskala kecil menengah dan hanya terbatas kawasan Pantai Utara.¹ Pola seperti ini pernah dikritik oleh Raffles pada awal masa pemerintahannya. Dia menyebut hubungan *patron-client* ini sebagai bentuk perbudakan yang perlu dihapus dan diganti dengan prinsip liberal. Usaha ini nampaknya tidak berhasil karena ikatan patron client ini sudah menjadi budaya yang cukup mengakar di masyarakat Jawa. Menurut orang Pemerintah Belanda – yang kembali mengendalikan kekuasaan setelah kekuasaan Inggris berakhir di tahun 1816, kegagalan Raffles disebabkan mencoba memaksakan sistem administrasi kolonial modern dari luar (Frunivall; 1944, 78).

Pandangan liberalisme yang menjadi awal sistem ekonomi kapitalisme dunia tersebut sebenarnya bukan diawali oleh Raffles. Pandangan liberalis pertama kali diperkenalkan oleh Dirk van Hogendorp, seorang Gubernur VOC di menjelang akhir kebangkrutannya. Setelah sempat diinterupsi oleh pemerintahan sisipan Inggris, gagasan ekonomi liberal sempat akan dihidupkan lagi oleh Baron van der Cappelen. Bagi kubu patriotik rezim Belanda, liberalisme identik dengan mid-victorian England. Gagasan liberalisme ini berasal dari Adam Smith dan Bentham, Voltaire (Jean Marie Arrouiet) dan Jean Jacques Rousseau. Kata kunci Kebebasan, Persamaan dan Persaudaraan telah diformalisasikan dalam bentuk konstitusi. Secara prinsip, kebebasan menuntut adanya kebebasan individu, hak milik dan perdagangan. Dalam ranah politik kebebasan bermakna kebebasan berkumpul, berpikir, berbicara, beragama, dan persamaan di depan hukum. Pada awalnya, pandangan liberalisme ini mendapat hambatan dari sistem monopoli dan hak-hak khusus yang menjadi prinsip dasar ekonomi kolonial (Furnivall;1944, 81).

Pandangan liberalis ini secara perlahan mulai diaplikasikan oleh pengganti Van der Cappelen, Du Bus Gesignies. Gesgnies (1826-1829) adalah seorang liberalis berasal dari Belgia. Dia berpendapat bahwa pengenalan sistem perkebunan bebas

¹ *Patron client relationship* adalah hubungan antara penguasa dan rakyat yang diibaratkan seperti hubungan antara bapak dan anak. Seorang anak akan mengabdikan kepada bapak sebagai imbalan perlindungan yang telah diberikan dari bapak kepada anak. Suhartono, *Apanage dan Bekel*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

(kapitalisme) disertai dengan sebuah dorongan produksi semua jenis tanaman perdagangan, merupakan satu-satunya jalan memperkuat pondasi perdagangan dan pendapatan. Dia mengikuti pola pikir Raffles yaitu "jika rakyat makmur maka mereka akan punya daya beli untuk membeli barang kita". Oleh karena itu, Du Bus mendorong peningkatan produksi sehingga petani akan punya daya beli lebih kuat". Namun demikian, sebagai besar penduduk Jawa tidak terbiasa dengan ambisi sedemikian. Para petani telah lama terbiasa untuk memproduksi secara terbatas dan cukup untuk kebutuhan mereka sendiri. Di sisi lain, defisit keuangan yang dialami oleh Belanda menjadi alasan ide-ide liberal ini dikesampingkan. Sekalipun demikian, ide mempercepat peningkatan produksi dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengubah status tanah "tidak bertuan" menjadi tanah milik negara. Pada umumnya di Jawa, tanah yang tidak produktif baik untuk sawah maupun ladang tidak diperhatikan sehingga kepemilikannya tidak jelas.

Du Bus Gesignies digantikan oleh van Den Bosch. Bosch adalah seseorang yang terinspirasi oleh keberhasilan *Preanger System*. Pandangan Bosch sangat bertolak belakang dengan Raffles, dan Gesignies. Dia adalah seorang konservatif dan terinspirasi dengan *Preares Stelsel*. Dalam sistem tersebut, setiap orang membayar pajak kepada negara bukan dalam bentuk uang – sebagaimana yang dipromosikan Raffles, namun dalam bentuk kopi atau tanaman perdagangan lain. Rakyat tidak boleh memberikan "pajak" lain kepada bupati kecuali yang telah menjadi kebiasaan. Sistem ini kemudian dikenal sebagai sistem tanam paksa (*Culture stelsel*). Van den Bosch mengadopsi sistem lama dimana pada Bulan Januari 1833 dia memerintahkan semua kopi harus dijual ke Pemerintah dengan harga fix. Ketentuan ini mengakhiri perdagangan kopi yang dilakukan swasta, sekaligus memberikan hak monopoli dagang pada negara. (Furnivall;1944, 120)

Tahun 1850 diwarnai kasus kelaparan yang berturut-turut, stagnasi produksi dan konsumsi, dan tingkat pertumbuhan penduduk eropa yang sangat rendah. Ini semua adalah tanda memudarnya sistem tanam. Di sisi lain, volume dan frekuensi pengiriman barang ke Belanda meningkat, perdagangan dan manufaktur telah memperlihatkan bahwa perusahaan swasta telah siap mengambil alih negara.

Perubahan yang terjadi di Jawa umumnya dan Malang pada khususnya terjadi sangat cepat setelah pemberlakuan sistem liberal. Kebebasan usaha telah memperbesar volume produksi. (Furnivall;1944, 222) Salah satu wilayah yang mengalami proses modernisasi sebagai dampak liberalisasi adalah Malang.

Momentum awal perkembangan kota Malang terjadi pada tahun 1826. Kejadian itu tidak lepas dari kebijakan politik yang diambil oleh Gubernur Jendral Burggraaf Du Bus Gisignes. Gisignes menginstruksikan pemanfaatan semua lahan kosong untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan tanaman komersil. Usaha itu dalam rangka menjadikan daerah koloni sebagai penghasil uang bagi Kerajaan Belanda (Elson; 1983, 37) Salah satu wilayah yang menjadi areal percobaan adalah dataran Tinggi Malang, Ngantang, Sisir, Pujon dan Penanggungan. Empat tahun kemudian, tahun 1830 hasil produksi kopi di kawasan Malang menunjukkan kesuksesan yang luar biasa. Berdasar catatan Residen Malang, Hoffman, hasil kopi di kawasan dataran tinggi Malang mencapai 50.000 *pikul* (P.K.W. Lakeman; 1934, 14). Keberhasilan ini diikuti dengan keberhasilan berikutnya sehingga tidak lama Malang menjadi sentra perkebunan. Jika di kawasan Malang Utara lebih didominasi dengan tanaman kopi, kawasan Malang Selatan lebih didominasi tanaman Tebu. Terdapat 4 pabrik gula yang tersebar di kawasan Malang Selatan dan Barat Daya yaitu Kebon Agung, Sempal Wadak, Kreet dan Panggunrejo. Hanya sedikit kawasan yang ditanami produk Tembakau. (Reza Hudiyanto; 2009, 59-60)

Perkembangan kawasan perkebunan ini tidak hanya berdampak pada perubahan sistem irigasi dan cocok tanam namun juga struktur masyarakat. Pekerjaan penduduk Bumiputra tidak lagi didominasi oleh sektor pertanian namun juga sektor baru yaitu jasa, transportasi dan industri-pabrik. Pembangunan infrastruktur perkebunan seperti jembatan, jalan, gudang dan transportasi menciptakan profesi baru seperti tukang batu, kuli bangunan, tukang kayu dan pekerja pabrik. Sekalipun sebagian besar aktivitas perkebunan berlangsung di pedesaan, akan tetapi, pusat distribusi, pembiayaan, kredit, debit, transaksi dan kendali politik terjadi di kota. Dengan demikian, perkembangan sektor industri perkebunan di desa-desa berdampak langsung pada pembentukan kota Malang.

Perkembangan industri perkebunan telah menjadi penyebab investasi di bidang transportasi. Perkembangan kapitalisme tidak hanya direpresentasikan dalam kegiatan investasi di bidang perkebunan. Pengembangan investasi juga berlangsung di sektor transportasi. Keberhasilan penanaman modal di sektor transportasi ini dibuktikan dari catatan tahunan perusahaan tram Malang (Malang Stoomtram Maatschappij). Perusahaan yang berbasis di Belanda ini membangun jalur tram yang menghubungkan Malang dengan Tumpang dan Bululawang-Dampit, dengan total panjang jalur 83 km. Keuntungan dari investasi di bidang transportasi di Malang dapat dibuktikan dari catatan perusahaan dari tahun 1911 hingga 1919 (*Jaarverslag Malang Stoomtram Maatschappij 1911-1919*).

Penghasilan yang diperoleh dari operasional tram ini naik dari f.340.000 pada tahun 1911 menjadi f.408.000 pada tahun 1912, atau mengalami kenaikan f.11,23 hingga f.13,45 per hari per kilometer. Kenakan terjadi baik untuk pengangkutan manusia maupun barang. Jumlah penumpang yang diangkut naik dari 1.186.105 orang dengan total pemasukan sebesar f.129.000 pada tahun 1911 menjadi 1.400.553 penumpang dengan pemasukan sebesar f.155.000 pada tahun 1912. (tidak mengikutsertakan perhitungan penumpang abonemen) Yang perlu diperhatikan adalah sedikitnya jumlah penumpang untuk kelas pertama dan kedua jika dibandingkan dengan kelas 2 untuk pribumi, pada tahun 1912:

Penumpang kelas 1 5.207= 0.37% dari keseluruhan jumlah penumpang

Penumpang kelas 2 11.649= 0.83% dari jumlah keseluruhan penumpang

Penumpang kelas 3 1.383.697= 98.79% dari jumlah keseluruhan penumpang

Total penghasilan dari pengangkutan barang (sewa gerbong, dan berbagai keuntungan lain) dijumlah sebagai berikut. Pada tahun 1910, penghasilan total perusahaan adalah f.168.000,. Dari jumlah ini, f.145.000 merupakan hasil dari angkutan barang. Pada tahun 1911 penghasilan total f.208.000, dari jumlah ini 178.000 merupakan pemasukan dari angkutan barang. Pada tahun 1912, penghasilan f.250.000, dari jumlah ini 218.000 merupakan sumbangan dari angkutan barang. Dengan demikian, pemasukan dari transportasi barang lebih mendominasi perolehan pendapatan dibanding pengangkutan penumpang.

Pertambahan pendapatan dari pengangkutan barang ini dari tahun 1911 hingga tahun 1912 mencapai 22%, dan jika dihitung dari tahun 1910 mencapai lebih dari 50% dan ini cukup menarik, jumlah barang yang diangkut hanya bertambah dari 119.000 pada tahun 1910 menjadi 145.000 pada tahun 1911, dan 146.000 pada tahun 1912 d.i pada tahun 1912 Cuma hanya 0.7% lebih dari tahun 1911, dan 22% lebih dari pada tahun 1910, sementara jumlah ton kilometer pada tahun 1912 bahkan berkurang sangat banyak jika dibandingkan dengan pada tahun 1911 yaitu 2.787.000 pada tahun 1911 dengan 2.397.000 pada tahun 1912. (*Verlag der Malangstoomtram Maatschappij*, 1911-1912).

Penghasilan dari perusahaan pada tahun 1919 secara umum menguntungkan. Biaya eksploitasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik cukup signifikan yaitu f.7600, jumlah penghasilan bersih masih lebih besar f.2000 dari penghasilan pada tahun 1918. Pendapatan kotor perusahaan f.96000 lebih tinggi daripada tahun 1918. Pertambahan yang paling utama berasal dari penerimaan setelah tahun-tahun perang. Pengangkutan penumpang menghasilkan pendapatan f.12000 sementara untuk barang bertambah menjadi f. 82000.

Peningkatan biaya eksploitasi merupakan dampak dari peningkatan jumlah upah, f.8000 ; penambahan personel f.6000,- kenaikan harga bahan bakar f.23000 dan penerapan perubahan sistem pembukuan. Dimana pajak pendapatan mulai dibukukan dalam tahun ini, dimana jumlah pendapat adalah f.24000, dan juga adanya kenaikan harga material, pengangkutan yang lebih banyak dan sebab-sebab lain sebesar f.15000. Bersamaan dengan periode tahun-tahun peperangan, tidak ada peningkatan pembelanjaan material dan pengangkutan, yang sejak 1912 telah berlipat ganda, diperlukan adanya peningkatan dana cadangan. Ada dana cadangan f.135000 kasus terjandinya penyusutan luar biasa. Selain itu, ada sejumlah dana f.15000 yang disetor untuk dana gratifikasi dan topangan. Untuk pemegang saham, 9% telah dibayarkan. (*Verlag Malang Stoomtram Mij*, 1913)

Mengingat adanya peningkatan kebutuhan hidup yang cukup tajam selama tahun 1919, perusahaan memberikan *duurtoeslag* kepada pegawai sebesar 10% dari upah, disertai dengan gratifikasi 2 bulan gaji. Juga diajukan perbaikan jumlah upah.

Panjang jalur kereta api tidak mengalami perubahan, begitu juga jumlah lokomotif dan gerbong. Ada penyediaan 30 gerbong barang tertutup dan 17 gerbong barang terbuka. Penambahan yang cukup penting adalah jumlah *askilometer*, dari 6.135.962 km, dibandingkan dengan 5.314.312 pada tahun 1918, penambahan yang sama terjadi pada jarak yang ditempuh penumpang dan ton-kilometer dari 1.795.291 km hingga 18.748.625 km dan 4.375.957 km hingga 5.277.197 km. Penghasilan kotor keseluruhan naik dari f.653.794 pada tahun 1918 (f.21.23 per hari per kilometer), hingga angka f. 750.070 (f.24.36 per hari kilometer), total penghasilan bersih dari f.403.505 pada tahun 1918 (f.13.10 per hari per kilometer). Dalam model usaha modern, perusahaan harus menyerahkan sebagian keuntungan pada pemegang saham sejumlah f. 162.000. Sekalipun demikian, perlu dipertimbangkan, baik upah maupun bahan bakar yang masih akan ada peluang mengalami kenaikan, toh dengan kenaikan dari pendapatan ini – diharapkan pada tiga bulan pertama tahun 1920 penghasilan kotor mencapai angka f. 16.647 lebih dari capaian pada tahun 1919. (*Verslag der Malang Stoomtram Maatschappij 1917-1919*)

B. Kondisi ekologi Kota

Penataan ruang kota Malang pada pertengahan abad XIX masih sangat sederhana. Jumlah penduduk yang masih sedikit, ditambah luas lahan yang masih berlimpah membuat kebutuhan akan tata kota masih belum menjadi prioritas. Lembaga kekuasaan baru mencakup tiga aspek, kekuasaan, kehakiman dan ekonomi. *Pendapa* bupati, kantor Asisten Residen, kantor jaksa, gudang kopi, penjara, pasar dan *geldkamer* merupakan bangunan-bangunan publik yang terdapat di sekitar alun-alun. (Reza Hudyanto; 2009, 147) Simbol-simbol budaya orang Jawa justru tidak terletak dalam susunan yang seharusnya. Posisi yang seharusnya ditempati oleh pendapa bupati justru ditempati gedung Asisten Residen. Struktur jalan dan posisi alun-alun tidak sesuai dengan pola umum yang terdapat pada kota-kota lain di pulau Jawa (Basundara; 2010, 166-7).

Hingga tahun 1867, arsip Keresidenan Pasuruan menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang cukup penting dalam tata ruang kota Malang. Sekalipun produksi

kopi senantiasa mengalami peningkatan, gejala itu tidak memberikan pengaruh pada perkembangan tata ruang kota. Perubahan yang cukup berarti terjadi semenjak kota Malang terhubung dengan jalur Kereta Api.pada tahun 1879. Sekalipun tidak begitu cepat, pembangunan stasiun kereta api di Malang telah mendorong percepatan mobilitas penduduk dan barang. Tidak lama setelah peristiwa itu, Malang dijadikan oleh departemen Pertahanan (*Departemen van Oorlog*) sebagai tangsi pasukan artileri senjata berat, kavaleri KNIL dan *marechaussée* pada tahun 1887 hingga 1917 (Reza Hudiyanto; 2009, 153-4).

Pada tahun 1912 wabah Pes menyerang kota Malang. Peristiwa ini berpengaruh pada laju pertumbuhan penduduk dan tingkat mobilitas. Setiap orang yang akan menuju dan keluar kota Malang harus melewati pos lokasi tentara di Dampit dan Lawang. Tahun 1914, kota Malang dilanda wabah influenza. Sekalipun demikian, peristiwa ini hanya menunda kemajuan yang lebih cepat karena perkembangan di tingkat negara mengarah ke era baru yaitu era desentralisasi (Ibid, 68-69).

Era desentralisasi di kota Malang dimulai pada tahun 1914. Pada tahun itu Gubernur Jendral menandatangani sebuah surat keputusan yang menyatakan Distrik Kota Malang berubah status menjadi Gemeente. Keputusan ini membawa konsekuensi Birokrasi Kota tidak lagi berada di bawah payung *Binenland Bestuur* namun berdiri sendiri di bawah kendali walikota dan Dewan Kota Keputusan ini tidak langsung diikuti dengan perubahan pengelolaan ruang kota. Butuh waktu kurang lebih 10 tahun sebelum desentralisasi itu berjalan efektif dan Pemerintah Kota mampu mengelola keuangan secara mandiri.

C. Menciptakan Mesin Uang

Pada tahun 1919, H.Bussemaker diangkat sebagai walikota pertama setelah 5 tahun Gemeente Malang dibawah pemerintahan asisten Residen. Ambisi pertama Bussemaker adalah memindahkan kantor *Gemeente* ke gedung baru yang merepresentasikan kebesaran kota. Empat tahun kemudian pemerintah pusat menyetujui proposal *Gemeenteraad* Malang untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Persetujuan itu dilatar belakangi oleh faktor pertumbuhan penduduk, terutama warga Eropa di kota Malang yang sangat cepat (Lakeman; 1924, 34).

Apa yang terwujud kemudian ternyata melebihi ambisi Bussemaker. Pembangunan tidak hanya menghasilkan gedung dewan kota baru namun juga pasar, sekolah, kompleks olah raga, perumahan, rumah potong hewan dan juga ruas-ruas jalan baru yang dilengkapi dengan taman dan jalur hijau. Otoritas kota memanfaatkan saran dari ahli arsitektur Belanda Thomas Karsten dalam mewujudkan konsep *garden city*. Ini yang menyebabkan kota Malang memadukan unsur kepentingan praktis dan estetika. Ada keseimbangan antara rumah dan lahan hijau.

1. Sewa dan Pajak Rumah (*Grondbedrijf*)

Komersialisasi di bidang pertanahan didahului dengan proyek perluasan kota sekitar tahun 1921. Ketika rencana ini dipublikasikan, banyak spekulasi tanah bermunculan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya monopoli para pemborong tanah, maka Pemerintah kota diberi prioritas dalam mendapatkan tanah. Sekalipun demikian, pembangunan tetap melibatkan swasta yaitu *NV Bouwmaatschappij Villapark* dan *NV Grondexploitatie Vilapark*. Rencana yang diajukan kepada pemerintahan adalah skala 1:10.000. Untuk mewujudkan rencana perluasan kota itu, sebuah rancangan perluasan diajukan kepada *Stadsgemeenteraad*. Harga tanah di kawasan tersebut (Oro-oro dowo) rata-rata adalah f.3 per meter persegi (Van Liempt: 1939, 173). Pembangunan itu berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari 1919-1924, dan tahap kedua 1924-1930. Krisis ekonomi dunia yang menghantam Hindia Belanda telah menyebabkan pembangunan kota menjadi berhenti. Segera setelah pembangunan kompleks ini selesai, pemerintah kota "menjual" rumah-rumah ini dengan harga sewa yang cukup mahal. Berikut ini adalah keuntungan yang didapat dari pembangunan kawasan permukiman.

Tahun	1934	1935	1936	1937	1938
Pendapatan (dalam f.)	56,6999,45	46,354,69	42,843,07	46,480,33	46,173,75

Malang dibangun atas dasar cetak biru yang membagi kota menjadi 8 kawasan (*bouwplan*). Berikut ini adalah rincian *bouwplan* dan kawasan peruntukan. *Bouwplan* I mencakup kawasan antara Celaket dan Rampal. Kawasan ini disebut dengan *Orangebuurt*. Kawasan ini mulai dibangun pada tahun 1917 dan yang diperuntukan sebagai kawasan hunian elit. *Bouwplan* II mencakup kawasan antara Klojen Lor hingga sungai Brantas. Kawasan seluas 166.000 m² ini disebut dengan *Gouverneur-generaalsbuurt* dan diperuntukkan sebagai kawasan pendidikan, pemerintahan dan hunian. Daerah ini mulai dibangun pada tahun 1920. *Bouwplan* III meliputi kawasan Selatan kota di sekitar Kampung Sukun. Kawasan ini diperuntukkan bagi pemakaman Eropa. *Bouwplan* IV meliputi kawasan persawahan Lowokwaru. Pada awal pembukaan di tahun 1917, pemerintah ingin menjadikan kawasan ini sebagai pemakaman warga Eropa. Tujuan ini dibatalkan karena munculnya keberatan dari warga di sekitar Lowokwaru. Dikemudian hari, kawasan ini tidak begitu diminati warga Eropa sehingga pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai Penjara Negara pada tahun 1921 (Lakeman; 1934, 44).

Bouwplan V mencakup kawasan Talun. Kawasan ini diperuntukkan bagi perumahan warga Eropa kelas menengah-elit. Kawasan yang terletak di kampung Talun dan Oro-oroDowo ini dikembangkan pada tahun 1922 hingga 1931. *Bouwplan* VI meliputi kawasan selatan Kota antara kampung Mergosono dan Sukun. Kawasan ini dirancang dibawah penasehat ahli tata kota Ir Thomas Karsten. Beberapa petak dari kawasan ini digunakan oleh BPM², sekolah dan perumahan yang diusulkan oleh kelompok Indo Eropa. Hanya sebagian kecil kawasan yang diperuntukkan untuk rumah-rumah Bumiputra.

Bouwplan VII mencakup kawasan yang merupakan perluasan dari Bulevard Ijen. Kawasan ini ditujukan untuk perumahan dengan harga berkisar antara f.4,5 hingga f.6 per meter persegi. *Bouwplan* VIII berada di kawasan perluasan kota di bagian selatan. Kawasan ini diperuntukkan untuk Industri. Penempatan kawasan industri ini berkaitan dengan posisi stasiun Kotalama dan *Malang Stoomtram*. Pada

² *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (Perusahaan Minyak Hindia Belanda)

tahun 1931, NV Faroka membeli tanah seluas 21.000 m² untuk pendirian pabrik rokok. Menyusul Faroka, Perusahaan dagang dan Pabrik Oli Kian Hong membeli tanah di kawasan ini untuk penggilingan beras, pabrik minyak kacang dan kelapa. Pada tahun 1931 – 1932 *Gemeente* membangun emplasemen untuk bengkel, gudang senjata, markas pemadam kebakaran dan kandang ternak.

Pada awalnya pengembangan kawasan permukiman elit ini akan dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam rangka menghindari peran spekulasi tanah. Unit pemerintah ini disebut dengan *Gemeentelijk grondbedrijf*. Akan tetapi beratnya tingkat kesulitan teknis dan permodalan menyebabkan *Gemeente* mengikutsertakan swasta dalam pengembangan kawasan hunian yaitu *NV Bouwmaatschappij Villapark* dalam rangka mengatasi spekulasi tanah.

Pada tahun 1930, Krisis ekonomi dunia melanda Hindia Belanda. Dampak langsung dari krisis ini adalah terhentinya aliran modal untuk pengembangan kota lebih lanjut. Ini menjadi sebab kota Malang relatif tidak banyak mengalami perluasan ruang setelah tahun 1931. Pemutusan hubungan kerja akibat tidak beroperasinya berbagai industri perkebunan di sekitar Malang menyebabkan geliat pembangunan kota mengalami penurunan. Sekalipun pada tahun 1934 gejala pemulihan mulai terlihat, namun era keemasan pembangunan kota tidak pernah tercapai lagi hingga berakhirnya kekuasaan Belanda pada tahun 1942.

2. Sewa Los los Pasar (*Pasarbedrijf*)

Proses kolonisasi pasar berawal pada tahun 1917. Pemerintah kolonial mulai mengubah pola pasar dari mingguan³ ke pasar harian. Pasar modern ini mulai ditampilkan dalam bentuk fisik yang megah, dan kios yang memenuhi standar kesehatan. Standar kesehatan itu ditandai dengan adanya kasa anti lalat, lantai beton dan pemisahan kios antara jenis dagangan. Pasar pecinan ini pada awalnya adalah

³ Dalam tradisi Jawa, kemunculan pasar di tempat tertentu sangat tergantung pada hari pasaran. Dalam tradisi Jawa hari pasaran ada lima yaitu pon, wage, legi, paing, kliwon. Posisi pasar berganti-ganti menyesuaikan dengan hari pasaran.

sejenis pasar tiban, namun karena tingkat kunjungan dan nilai transaksi makin tinggi, pasar ini diambil alih *Gemeente*. Tahap awal modernisasi pasar ini berakhir pada tahun 1924 (Sardjono, 1954, 49). *Gemeente* mengeluarkan dana hingga f.139.279,-. (Lakeman: 1934,69).

Pasar ini terus mengalami perbaikan antara lain pada tahun 1934. Modernisasi pasar ini berdampak pada pembangunan terminal dan halte taksi. Jumlah pengunjung dan pedagang pasar makin tahun makin bertambah. Di sisi lain, jumlah pasar kampung juga makin bertambah seperti pasar Klojen, Pasar Bunul, Pasar Oro-oro Dowo dan Pasar Kebalen. Pembentukan pasar-pasar pembantu itu dalam rangka memecah kepadatan yang terjadi di Pasar Besar.

3. Penjualan Air Bersih (*Waterleidingbedrijf*)

Pada awalnya, masyarakat Jawa mengenal air sebagai bagian tidak terpisahkan dari setiap ritual. Iklim tropis dengan curah hujan tinggi telah berkontribusi terhadap karakter dan kebiasaan hidup masyarakat yang sering menggunakan air. Air dianggap sebagai sebuah benda yang melimpah sehingga tidak ada pemahaman air sebagai benda yang dinilai dengan uang, kecuali jika terdapat tuah atau keramat pada air tersebut (Boomgard; 2007,12).

Pemahaman ini berubah ketika bangsa Belanda mendiami tanah Jawa khususnya Malang. Pada umumnya penduduk Eropa yang tinggal di daerah tropis senantiasa dicekam dengan kekhawatiran tentang kualitas kebersihan air minum. Bahaya disentri, cholera dan *thyipoma* telah membuat mereka begitu sensitif terhadap air dan makanan. Oleh karena itu, mereka membangun jaringan penyedia air yang dijamin aman dikonsumsi. Salah satu unit penyedia air itu adalah *Waterleiding bedrijf* yang berada di bawah *Gemeente*. Jaringan air itu telah dibangun sejak tahun 1914, ketika Malang dibawah *Gewestelijk* Pasuruan.

Gemeentelijk waterbedrijf mendapatkan air dengan cara memanfaatkan sumber air untuk kemudian ditampung di *reservoir* (tandon) di Betek dan Dinoyo. Sumber-sumber air itu berada di Karang, Sumbersari, Bangun, dan untuk selanjutnya didistribusikan lewat jaringan pipa air. Semua terowongan air maupun

pipa harus bebas dari infeksi. Pengelola *waterleiding* mempekerjakan ahli bakteriologi untuk menguji tingkat kebersihan air. Pada tahun 1937, perhitungan air mulai dilakukan dengan lebih cermat dengan dipergunakannya watermeter. *Watermeter* itu dipergunakan untuk menghitung jumlah volume air yang telah digunakan untuk kebutuhan rumah.

Disamping disalurkan ke rumah-rumah Belanda, *Gemeente* juga membangun hydrant dan kran umum. Kran itu ditempatkan dalam sebuah tempat mandi dan cuci umum. Penduduk kampung harus membayar tarif tertentu untuk pemakaian air di tempat tersebut. Berikut di bawah ini adalah laporan penghasilan yang diperoleh *Gemeente* dari pengelolaan air.

Tahun	Pemasukan
1934	314,142,03
1935	288,710,89
1936	275,000,44
1937	289,180,35
1938	276,244,71

(Van Liempt: 1939, 160-162)

Berdasar uraian di atas, maka pembangunan sarana air minum membuka awal dari komersialisasi sumber daya alam. Pada abad berikutnya, yaitu abad XXI, air telah menjadi bahan dagangan yang memiliki nilai ekonomis, tidak hanya dalam volume kubik namun hingga pada ukuran cc.

4. Biaya *Keur* (uji) dan Pematangan Hewan

Dampak pertama dari modernisasi ini munculnya berbagai fasilitas umum mulai dibangun sesuai dengan selera warga Eropa. Mayoritas penduduk Eropa lebih menginginkan kebersihan makanan dan lingkungan. Sebagai konsumen daging, buah dan sayuran, warga Eropa di kota Malang menghendaki pasar yang lebih bersih, dan rumah potong hewan yang memiliki standar sesuai dengan yang berlaku di Eropa. Kondisi ini sering direspon oleh para pemasok babi atau hewan ternak dengan

menyelundupkan hewan ternak ke dalam kota tanpa melalui rumah potong untuk menghindari pungutan.

Kategori hewan yang harus dipotong di rumah potong hewan adalah sapi, babi, domba dan kambing. Berikut dibawah ini adalah data jumlah hewan yang disembelih di rumah potong hewan selama periode tahun 1937-1938:

Jenis hewan	Sapi		Babi		Domba dan Kambing	
	Tahun 1937	Tahun 1938	Tahun 1937	Tahun 1938	Tahun 1937	Tahun 1938
Jumlah	11,815	11,564	4,156	3,986	6,292	5,570

(Van Liempt: 1939, 146)

Pendirian rumah potong hewan ini ternyata justru ditanggapi oleh aksi penyembelihan "illegal" di pinggiran desa. Pemerintah menyebut aksi ini sebagai *clandestiene slacht*. Tingginya biaya uji dan "inap" hewan dianggap sebagai alasan dari para pemilik hewan melakukan pemotongan di luar rumah potong. Selama tahun 1937 telah ada 17 pelaku pemotongan hewan gelap yang diproses verbal. Sebagian dari pelaku dihukum denda berkisar dari f.25 hingga f.125. Langkah pemerintah ini berhasil menurunkan jumlah kasus penyembelihan gelap pada tahun 1938 (Van Liempt: 1939,146-7)

Pemerintah kota membangun *abbatoir* atau rumah potong ini di daerah Mergosono. Bangunan ini cukup luas dan memenuhi persyaratan sebagai pemotongan hewan modern. Melalui rumah potong ini, pemerintah kota mendapatkan pemasukan melalui uji klinis dan penggunaan rumah potong; uji daging yang akan didistribusikan, penelitian, dan penggunaan ruang daging. Berikut ini adalah hasil kegiatan pemotongan, ujim dan penelitian daging sapi, kuda, kerbau, babi, domba dan kambing di rumah potong yang memberi kontribusi pada keuangan *Stadsgemeente*.

Tahun	1934	1935	1936	1937	1938
Jumlah pemasukan (dalam gulden)	27,652	28,618	27,407	32,029	31,008

(
Berdasar beberapa contoh kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kolonialisme yang berbaju modernisme memiliki cakupan pengaruh yang cukup luas dan mendalam. Pemerintah kolonial berusaha menanamkan pola pikir dan menyamakan prespektif tentang bagaimana hidup sehat.

Dampak lain dari pemberlakuan modernisasi adalah semakin banyaknya jenis pajak. Desentralisasi 1903 yang diikuti dengan pembentukan Gemeente Malang pada tahun 1914 menyebabkan pemerintah lokal harus sanggup membiayai operasional di daerah kota Malang. Salah satu pemasukan yang paling potensial adalah dari sektor pajak dan retribusi. Modernisasi pasar, pembangunan saluran air minum, pembangunan perumahan, dan rumah potong ternyata membawa konsekuensi finansial bagi penduduk kota. Ini disebabkan adanya tarif pada setiap pemakaian semua fasilitas yang telah dibangun oleh *Gemeente*. Jika setiap pelanggaran terhadap pemanfaatan fasilitasn selalu diproses verbal maka semakin banyaknya jumlah pelanggar hukum di kalangan warga kota. (Reza Hudiyanto; 2009, 261)

Peraturan lalu lintas, peraturan berjualan, peraturan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan penjualan minuman keras gelap menjadi salah satu sebab munculnya banyak pelanggaran. Semakin banyak ruang baru yang dibangun oleh Gemeente, semakin banyak peraturan yang ikut menyertainya. Ada kecenderungan bahwa *Gemeenteraad* – yang didominasi oleh warga Belanda, ingin memaksakan konsep kehidupan kota ke dalam masyarakat Bumiputera yang sebenarnya memiliki pemaknaan yang berbeda tentang ruang kota

Permasalahn kota mulai mengemuka pada awal abad ke-20. Menurut Kusno, munculnya permasalahan kota tidak lepas dari problem yang muncul sehingga kota harus ”diatur”. Upaya mengatur kota ini tidak lepas dari kota yang telah berkembang menjadi ruang yang menyimpan potensi konflik. Kota juga dianggap memfasilitasi kemunculan radikalisme dan kesadaran politik di kalangan penduduk Bumiputera.

D. Periode Dekonstruksi dan Rekonstruksi

Pasca persetujuan pengakuan Kemerdekaan RIS 27 Desember 1949, otoritas kota dikembalikan dari RECOMBA⁴ ke Pemerintah Kotapraja. Sistem keuangan yang belum stabil, belum adanya investasi masuk dan akumulasi modal yang masih kosong menimbulkan masalah rumit. Sedikit dana yang tersedia sebesar Rp.8.000.000,- lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan gedung-gedung baru, dan bukan untuk perbaikan fasilitas umum. Gedung-gedung itu diantaranya perkantoran, markas polisi, biro keuangan, penjara dan gedung perkantoran lain. Belum ada alokasi dana untuk perbaikan sarana gorong-gorong dan jalan. Ini digambarkan dalam surat kabar lokal sebagai berikut.

”Jika orang berjalan atau berkendara becak melalui jalan Kidul Pasar, Klenteng, Kebalen atau Kebalen wetan maka oran gharus berhati-hati kaerna di jalanan tersebut banyak terdapat lobang-lobang. Terlebih lagi jika orang naik becak melalui jalan Kebalen dan Kebalen wetan tentu perut menjadi sakit oleh karena sangat rusaknya. Pemerintah Kotapraja mengatasinya dengan cara yang kurang memuaskan yaitu dengan menutup lobang dengan bahan tanah ledokan. Itu justru akan memperlebar lobang, kecuali jika pernambalan jalan menggunakan aspal.. Ketika musim penghujan, lobang jalan yang ditutup dengan tanah tadi semakin lebar sehingga mempertinggi resiko kecelakaan lalu-lintas. Ini telah diprotes para tukang becak karena jalanan yang jelek itu bukan hanya di Kidul Pasar dan Kebalen namun juga di Sawahan, Embong Arab, Tongan, Blakang loji . (*Pewartu Soerabaia*, 23 Maret, 16 Maret dan, 8 April 1954)

Hingga Agustus 1954, 40% keadaan jalan raya di kotapraja Malang dalam keadaan rusak. Bahkan banyak yang keadaannya hancur sama sekali. Pembetulan secara total memang sulit dilakukan karena untuk perawatan tiap tahunnya saja membutuhkan aspal sedikitnya 180 ton sementara aspalk yang diterima dari pemerintah propinsi hanya 100 ton saja. (*Trompet Masyarakat*, 18 Agustus 1954)

Sementara itu, upaya lain yang dilakukan adalah penertiban gubuk illegal di sekitar jalan Jagalan pada 13 November 1951. salah satu alasan dari penutupan ini adalah rumah-rumah itu mengganggu pemandangan keindahan kota, dan tidak layak huni karena lebih mirip kandang. Rumah-rumah itu banyak berdiri di sekitar Stasiun Tram Jagalan. (“Perumahan Liar Dibongkar”, *Djava Pos* 15 November 1951). Di

⁴ *Regeering commissaries van Bestuur Administratie*

Jalan Pecinan, Pecinan Kecil dan Kayutangan para tunawisma sering dianggap menyebabkan sampah, dan kotoran yang menyebarkan bau busuk. Setiap pagi para pemilik toko harus menyiram dan membersihkan halaman toko mereka. Para pemilik toko ini sering meminta pihak kotapraja untuk menyelesaikan masalah ini (*Djava Pos*, 8 Djanuari 1952). Pada 1954, pemerintah kota berencana menghancurkan 150 gubuk yang berdiri tanpa ijin. Sebagai kompensasi mereka akan dipindahkan ke sebuah area di wilayah Mergosono, Lowokwaru, Kutobedah dan Sanan. (“150 bangunan menurut rentjana dibongkar”, (*Djava Pos* 3 Mei 1954). Pada tahun yang sama, pihak Kotapraja “menggaruk” kurang lebih 200 gelandangan. Beberapa dari mereka ditahan sementara yang lain dikirim ke Banyuwangi. (“Penangkapan Orang-orang Bambang”, *Pewarta Soerabaia* 31 Maret 1954. Pembongkaran pemukiman liar itu terus berlangsung hingga Agustus 1954, khususnya di Kampung Klojen dan Glitung. (Pembongkaran, *Djava Pos* 25 Agustus 1955) Pada bulan January 1957, di kampung Samaan pihak polisi menggagalkan upaya para gelandangan membangun gubuk di sekitar tanah milik “asing”. Polisi menjumpai telah ada 33 gubuk berdiri di kawasan yang belum jelas (Polisi Telah Menggagalkan Pembangunan Rumah Liar, *Terompet Masyarakat*, 25 Djanuary 1957).

Penertiban itu juga dilakukan di jalanan, khususnya terhadap 60 an penjual jalanan yang melakukan aktivitasnya di kawasan terlarang. (Djualan Di djalan, *Malang Pos*, 5 Djuni 1952) menurut beberapa penduduk di jalan Pecinan, dibandingkan dengan era sebelum perang, jumlah pedagang kaki lima semakin banyak. Tidak tersisa ruang sedikitpun di depan toko. (“Djadi semakin banjak”, *Pewarta Soerabaia*, 10 Maret 1954).

Permasalahan lain yang muncul adalah prostitusi. Berapa informan mengatakan bahwa sumber dari prostitusi adalah keluarga *broken-home*. Ada juga laki-laki yang justru memprofokasi wanita yang baru saja bercerai untuk jadi pekerja seks komersial. Dalam kasus lain, terdapat seorang suami yang menyuruh istrinya menjadi prostitut. Kasus prostitusi ini terdapat di jalan Kebalen wetan, dan Kotalama. (“Pelatjoeran makin meradjalela”, *Pewarta Soerabaia*, 8 Maret 1954) Sebenarnya prostitusi bukanlah fenomena yang muncul setelah kemerdekaan. Pada

era kolonial, tepatnya setelah *Gemeente* Malang berdiri, prostitusi telah menjadi fenomena umum, khususnya di kawasan Kebalen, Kotalama, Jodipan. (Hudiyanto: 2011) Keberadaan mereka oleh John Ingelson disebut sebagai *necessary evil* (setan yang dibutuhkan). Keberadaan aktivitas prostitusi secara tidak langsung berkaitan dengan pertumbuhan kapitalisme yang menyebabkan tekanan hidup perkotaan semakin kuat. Di sisi lain simbol kapitalisme yang memikat sebagian besar penduduk kota menciptakan sebuah orientasi kehidupan baru yang hanya bisa dicapai dengan kepemilikan uang.

Permasalahan rumit lain yang dihadapi pemerintah kota di awal tahun 1950an adalah urbanisasi. Pada bulan Juni 1954, jumlah penduduk Malang telah mencapai 279.562 jiwa. Seiring penambahan jumlah penduduk, volume sampah juga ikut meningkat dan ini berdampak pada lingkungan. Berdasarkan catatan dari dinas kebersihan, jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir Gadang sekitar 340 m kubik setiap hari. Kondisi kota digambarkan tidak seperti pada tahun 1942. Pada tahun 1942 kebersihan kota sangat terjaga dengan adanya 480 pekerja, 8 unit truk, 53 hewan penarik muatan, dan 50 gerobak. Peralatan dan tenaga ini dipergunakan untuk membersihkan wilayah di empat lingkungan di kawasan Klojen, Tumenggungan, Kidul Pasar dan Oro-oro Dowo. Faktor lain yang menyebabkan kondisi kebersihan kota sebelum 1942 lebih bagus ada pada karakter dari penduduk kota. Sebagian besar adalah penduduk yang disiplin dan sadar akan nilai penting dari kesehatan (*Malang Pos*, 17 January 1952).

Pada tahun 1953, kondisi kebersihan kota menurun disebabkan dua fakto penting. Kenaikan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga kebersihan dan peralatan. Jumlah petugas kebersihan tinggal 413 orang, yang dilengkapi 5 unit truk dan 72 gerobak yang ditarik manusia. Peralatan-peralatan lain dilaporkan rusak dan tidak mendapat pergantian dari pemerintah kota Malang. Situasi semakin diperburuk dengan ketidakdisiplinan penduduk kota. Mereka sering mengabaikan peraturan tentang sampah. Beberapa dari mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Beberapa membobol saluran air untuk kepentingan mereka sendiri. (*Malang Manasuka, Djawa Pos*, Sabtu, 2 Mei 1953). Hampir setiap hari

muncul keluhan di surat kabar tentang timbunan sampah yang menimbulkan bau busuk di tepi jalanan. Kondisi diperburuk dengan adanya orang yang kencing di sembarang tempat (*Djava Pos*, 30 April 1952). Hingga tahun 1964, kondisi ini belum bias diperbaiki karena keterbatasan sarana peralatan. Dinas kebersihan hanya memiliki 6 unit *truck*, 2 gerobak tangan, 50 sepeda dan 40 gerobak kecil. Volume sampah meningkat dari 880 m³ per hari di 1952 menjadi 1400 m³ 1964.

Deskripsi fakta tersebut diatas menggambarkan stagnasi dalam pertumbuhan simbol kapitalisme. Kondisi keamanan yang rawan pasca revolusi menjadi salah satu factor yang berkontribusi terhadap laPusat kegiatan investor masih terbatas di perkebunan yang sebagian besar tersebar di pedesaan. Ini menyebabkan di kota terjadi involusi perkotaan.⁵ Involusi terjadi ketika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektor perekonomian perkotaan sehingga banyak penduduk yang termarginalisasi dalam pertumbuhan sosial di kota. Masyarakat marginal ini rentan menjadi penyebab social disorder. Social disorder adalah bentuk perilaku yang menyimpang dari tradisi atau peraturan yang berlaku di perkotaan.

E. Nasionalisasi

“Dengan lancar pada hari kamis kemarin pagi sekitar jam 11 oleh panitia pembebasan Irian Barat Kotapraja Malang diiringi oleh sebarisan, pemuda, pelajar dan bekas anggota TRIP Djawa Timur telah melakukan penurunan gambar Ratu Juliama dan diganti dengan gambar Presiden Sukarno di sekolah Concordia HBS jalan Suropati dan *Nationaal Handelsbank* di Jalan Alun-alun Kulon. Nampaknya maksud panitia tersebut dapat dicitum terlebih dahulu oleh kepala sekolah concordant HBS di jalan Suropati. Ini dibuktikan sebelum panitia aksi embebasan Irian Barat melaksanakan tugasnya terlebih dahulu gambar ratu Juliana yang ada di tembok sekolahan tersebut diganti dengan gambar Bung Karno dengan ukuran yang lebih kecil;. Kemudian oleh panitya gambar kecil tersebut diganti dengan gambar Presiden yang lebih besar dan megah. Barisan panitia dengan pemuda-pemuda itu mendapat

⁵ Konsep ini meminjam dari apa yang dikemukakan Clifford Geerts sebagai involusi pertanian. Involusi adalah kondisi dimana pertumbuhan penduduk – yang diiringi dengan peningkatan kompleksitas, tidak diimbangi dengan penambahan jumlah lahan produktif. Fenomena yang muncul dalam situasi seperti ini adalah *shared poverty* atau kemiskinan bersama.

sambutan hangat dari rakyat sepanjang Kayu Tangan”. (Gambar diturunkan”, *Pewarta Soerabaia* 20 Desember 1957.)

Kutipan berita menggambarkan situasi saat gelombang nasionalisasi melanda kota Malang. Beberapa kantor cabang perusahaan Belanda yang ada di Malang menjadi sasaran aksi ,Pada tanggal 3 Mei 1954, DPRDS Kota Besar Malang bersidang dengan agenda membahas tentang usulan NV Giat untuk membuka usaha bis kota dengan dasar tarif sesuai kemampuan rakyat. Trayek yang akan melayani jalur Blimbing Kebon Agung tersebut akhirnya ditolak karena diprediksi dapat mematikan para tukang becak dan dokar. (*Pewarta Surabaya*, 5 Mei 1954)

Permasalahan hak milik dan kelola aset-aset ekonomis di negara Republik Indonesia sebenarnya sudah dimulai semenjak Konferensi Meja Bundar. Terjadi perbedaan penafsiran terhadap masalah hutang piutang, perbankan, moneter dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa pasal yang diyakini menyebabkan perundingan ini berlangsung cukup alot dan lama.

1. Belanda menghendaki segala hutang ditanggung RIS. BFO sependapat dengan RIS bahwa hanya menanggung hutang yang menyangkut kepentingan Indonesia. Padahal sebagian besar hutang yang dilakukan sebelum 1 Maret 1942 tidak pernah diperiksa.
2. Pihak Belanda menghendaki agar *circulatie bankwezen* , *geldwezen* diatur dengan persetujuan pihak Belanda selama RIS memiliki Hutang dengan pihak Belanda. Ini berarti segala hal yang menyangkut kebijakan moneter dan perbankan harus mendapat persetujuan pihak Belanda.
3. Belanda menghendaki adanya perwakilan mereka di *College devisien-beleid* RIS selama RIS memiliki kewajiban pelunasan hutang. Pihak Republik dan BFO menganggap adanya perwakilan Belanda ini tidak dapat diterima. Pihak Republik dan BFO hanya menerima Belanda sebagai penasehat ahli teknis.
4. Pihak Belanda menghendaki selama RIS memiliki hutang kepada Belanda, setiap RIS akan meminta pinjaman luar negeri, harus ada persetujuan dari

Belanda. Pihak Republik dan BFO hanya menyetujui pasal "after consultation".⁶

5. Dalam memorandim lain, Belanda menghendaki supaya azas perlakuan khusus (diutamakan) tidak hanya terbatas sampai warga negara dan badan hukum namun juga – sesuai kebiasaan internasional, diperluas hingga hasil-hasil kapal dan objek-objek lain. Pihak Indonesia berkeberatan, dan menyatakan tidak berjanji bisa menjalankan diskriminasi secara substansial. Kata perlakuan khusus ini dianggap tidak perlu karena kedua pihak mengakui bahwa TIS akan mengambil tindakan yang perlu untuk memelihara kepentingan nasional dan melindungi golongan yang lemah di lapangan ekonomi, hak mana yang dapat dipakai juga untuk menghindari diskriminasi.
6. Permasalahan berikutnya terkait dengan perusahaan dan onderneming yang berkedudukan dan menjalankan usaha di Indonesia. Pihak Indonesia menuntut bahwa perusahaan itu harus berada di Indonesia, sekalipun untuk perusahaan itu juga diberi masa peralihan 5 tahun. Pihak Belanda hanya bersedia untuk menempatkan badan perwakilan yang diberi kuasa penuh.
7. pihak Indonesia bersedia berunding dengan Belanda dalam hal pengangkatan presiden dan para direktur bank.
8. pasal ini merupakan pasal yang mengundang polemik. Tentang transfer ganti rugi harga kepemilikan yang disebabkan oleh pencabutan hak milik, nasionalisasi, penghapusan melepaskan atau memindahkan harta benda dan hak-hak dengan paksa c.q. pemilikan. Delegasi Belanda menghendaki agar sebelum transfer dilakukan harus ada persetujuan dengan yang berhak tentang ganti rugi dan harga kepemilikan. Pada prinsipnya pihak Indonesia bersedia menerima transfer dengan syarat jika kondisi devisien RIS memerlukan,

⁶ Memorandum Ketua Panitia ekonomi/keuangan tentang penyelesaian hutang piutang 13 september 1949.

transfer dapat dibagi-bagi dalam masa yang tertentu ditentukan oleh satu pihak saja. Resiko valuta harus ditanggung yang berhak.⁷

Secara umum, pemerintah Negara-negara Federal menyatakan sikap positif atas hasil KMB, namun masih menyayangkan tentang masalah Irian Barat dan hutang-hutang RIS. Di beberapa Negara Federal lain seperti Negara Sumatra Timur, hasil KMB ini masih menjadi polemik.⁸ Setelah berjalan selama 5 tahun, terbukti bahwa Belanda tetap melakukan kampanye politik di Papua melalui Jouwe, Kaseppo dan J Ariks. Mereka melakukan propagand di daerah Hollandia (Jayapura) Manoewari, Biak dan Jappen Waropen.⁹

Permasalahan ini telah menjadi awal konflik yang berujung ke nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Kebijakan ini akhirnya dituangkan dalam peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/ Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

Salah satu pertimbangan yang diambil adalah skala kepentingan. Perusahaan yang terkena nasionalisas adalah perusahaan yang merupakan cabang produksi penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ada beberapa pasal yang menjadi dasar hukum antara lain pasal 98 UUDS RI, UU no 86 tahun 1958 tentang nasinalisasi (Lembaran Negara 29 tahun 1957, PP no 2 tahun 1959 tentang pokok pelaksanaan UU Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Isi peraturan yang merupakan hasil keputusan sidang menteri tanggal 3 Maret 1959 adalah sebagai berikut:

⁷ Delegasi Indonesia No 1255. Surat Panitia urusan Keuangan dan Perekonomiam kepada Sekretaris Pusat mengeni hasil-hasil rapat panitia urusan keuangan dan Perekonomian 19 Oktober 1949.

⁸ Seri Naskah SUMber, Konferensi Meja Bundar, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta: 2004

⁹ Delegasi Indonesia no 1494 Surat dari Ketua-ketua PKII Serui, Alwi Rachman kepada ketua BPK di Djogjakarta tanggal 10 Januari 1950 tentang keadaan sekitar Irian.

Pasal 1, perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Republik Indonesia akan dikenakan nasionalisasi. Beberapa perusahaan yang dikenakan nasionalisasi antara lain adalah: *NV Nederlandsch Handell Maatschappij*: pabrik gula Modjoagoeng Jombang, *NV Vereenigde Vorstenlandsch Cultuur Maatschappij* Semarang: Pabrik gula Soedhono Madiun, *NV Nationale Industrie en Landbouw Mij* Jakarta: Pabrik Gula Merican Kediri (Pemilik di Belanda), Pabrik gula Redjosari Madiun (Pemilik di Belanda), Milik Kantor Direksi *NV Handelsvereniging Amsterdam* Surabaya dan Jakarta: Pabrik Gula Djatiroto (Belanda), PG Djengkol Kediri (Belanda), PG Galoehan Kediri (Belanda), Pabrik Tapioka Bendedjo Kediri (Belanda), PG Koenir Tulungagung (Belanda), PG Ngadiredjo Kediri (Belanda), PG Semboro Jember, PG Gunung Sari Jember, Pabrik Tapioka Toeren Malang; *NV Landbouw Maatschappij Oud Djember*: Perkebunan Kopi dan karet Renes Jember, Perkebunan Karet Kopi dan Coklat Kalisanen Jember; Perkebunan Karet Kopi Kedaten Badean, Perkebunan Karet Kopi Klatakan Perung Rejo; Perkebunan Karet Kopi Lengkong Mumbul, Perkebunan Karet Kopi Coklat Renteng, Semua berkedudukan di Jember namun pemilik ada di Belanda. *NV Cultuur Maatschappij Asim Sand*, Perkebunan Karet Kopi Banyuwangi; *NV Suiker Cultuur Maatschappij* : Pabrik Gula Asembagus Situbondo; pabrik kopi karet Bendokerep; pabrik karet Djamintoro Jember; Pabrik kopi Jampit, Gending waleh, Paal IV, Sumber Redjo Bondowoso, Pabrik Kopi Gunung Blau Baondowoso, Pabrik Karet kopi Coklat Bandjar Sari Jember, Pabrik Karet Kopi teh Djatirono, Banjuwangi, Pabrik Karet Kopi Kapuk Djolondoro Glenmore; *NV Perusahaan Perkebunan Djombang Baroe'*: Pabrik Gula Jombang Baroe, Jombang, PG Gending Probolinggo, PG Gempol Kerep Mojakarta, P Karet Kopi Gondang Tanggul; *NV Mij tot exploitie der verenigde Majanglanden*: Pabrik Karet dan Kopi Gunung Mjang Jember; Pabrik Karet Kali Banjing Jember; Pabrik Karet dan Kopi Monodjati Jember; Pabrik Karet dan Kopi Wonowiri Jember; Pabrik Karet Kopi Pasewaran Banjuwangi; *Handel Industrie en Landbouw Mij Tiederman en van Kerchem NV* Surabaya.: Perkebunan Kopi Kajoemas Bondowoso. Perkebunan Karet Kopi dan coklat Kali Kempit Banyuwangi; Pabrik Karet dan Kopi Kaliredjo;

Pabrik Karet Kopi Kandeng Lembu; Pagar Gunung dan Soengai Lemboe; perkebunan kopi Kalisat; Perkebunan Karet dan Kopi, coklat Banyuwangi

NV Cultuur Handel en Industrie Bank Cultuur: Pabrik Gula Kanigoro Madiun. JJ Ownall, Pabrik Kelapa Kampe Banyuwangi. *NV Cultuur Mij* Kedawoen Kawisredjo: PG Kedawung Pasuruan. *NV Cultuur Mij* Kertowono: Pabrik teh kina dan kopi Lumajang. Pabrik Gula Ketembong Sidoarjo; PG Tulangan Sidoarjo; PG Krian Sidoarjo. PG Ketemboeng; PG Tulangan, PG Modjopanggung Tulungagung, PG Olean dan Pagotta Situbondo; PG Panji Situbondo, PG Lestari Kertosono, PG Pesantren Kediri; *NV Oost Java Rubber Mij*: Pabrik Karet Pantjoeran/Pager Goenoeng Malang dan Pabrik Karet dan Kopi Sumber Djeroe; *NV Javasche Cultuur Mij* : PG Pesantren Kediri, PG Pedjarakan Probolinggo; *NV Cultuur Mij Zuid Banjoewangi*: Pabrik Kopi Soember Djambe; *NV Cultuur Mij Prajekan*; PG Pradjekan Situbondo; *NV Mij tot exploitatie der verenigde majanglanden*: Pabrik Karet Kopi dan Coklat Blitar; *NV Landbouw mij Oost Java*, Pabrik Kopi Rayap Djember; *NV Landbouw Mij Satak*, Pabrik Kipi Satak Kediri; *NV Landbouw Mij Sirih Kentjong*, Pabrik Kina Sirih Kentjong Blitar; *NV Cultuur Mij “Belirie”*, Pabrik Kopi Karet Silosanen Jember; *NV Cultuur Mij Soember Langsep*, Pabrik Karet Kopi Sumber Lansep Bajoewangi; *NV Cultuur Mij “Tjoekir”*, PG Tjoekir Jombang; *NV Cultuur Mij “Wadoeng West”*, Pabrik Kopi Manjoemangi; *NV Cultuur Mij “watoetoelis”*, PG watoetulis Sidoarjo; *NV CM*, “Wonolangen”, PG Wonolangen Probolinggo dan PG Wringin anom Panaroekan; *NV A van Hobotten and Co* dan *NV Exploitatie Mij “Dave”*, Pabrik Kopi Blawan/Kaligedang Banyuwangi; *NV internationale crediet en handelsvereniging Amsterdam*, Pabrik Karet dan Coklat Gorengredjo Djember. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan (2 Mei 1959) da berlaku surut hingga 3 desember 1957.¹⁰ Kebijakan ini dimuat dalam Lembaran Negara No 31 Tahun 1959.

¹⁰ Arsip koleksi Mr Bodan no 667, Arsip Republik, ANRI)

Untuk selanjutnya, peraturan itu dipertegas lagi dalam Undang-Undang no 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap perusahaan milik belanda yang berada di wilayah RI ini berkaitan dengan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pembatalan hasil KMB. Sebagai bagian dari perjuangan pembebasan Irian Barat, pemerintah perlu menasionalisasi perusahaan milik Belanda. Tujuan dari nasionalisasi ini adalah untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan memperkokoh keamanan dan pertanahan negara.

Dalam peraturan tersebut perusahaan milik belanda yang berada di wilayah republi dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pemilik perusahaan akan diberi ganti kerugian yang ditentukan berdasarkan ketetapan panitia yang anggotanya ditunjukkan oleh pemerintah. Ketentuan dalam *onteigeningsordonnantie Staatsblad* 1920 no 574 untuk nasionalisasi ini tidak berlaku. Undang-undang ini berlaku mulai 3 desember 1957. dimuat dalam Lembaran Negara no 162 tahun 1958

Kebijakan pusat ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan perusahaan Belanda, termasuk di dalamnya yang menjadi anak cabang perusahaan. *De Javasche Bank, Nationale Handels Bank* dan *Handels Vereeniging Amsterdam* di Malang harus menutup usahanya. Beberapa perusahaan perkebunan milik Belanda di Malang harus diambil alih. Ini sekaligus mengakhiri dominasi simbol kapitalisme barat di Malang, namun untuk sementara.

F. Kebangkitan Kembali Simbol Kapitalisme

1. Industri dan Energi

Malang berkembang menjadi salah satu sentra industri rokok sejak era Kolonial Belanda. Posisi kota Malang dari segi "orbitasi" di propinsi Jawa Timur menjadi faktor kunci yang mendukung perkembangan industri rokok. Posisi yang berada di tengah-tengah propinsi Jawa Timur ini memudahkan distribusi rokok. Faktor kedua adalah infrastruktur berupa jalan antar kota yang cukup lebar untuk

menampung arus kendaraan. Faktor ketiga yang menopang pertumbuhan industri adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi di kota ini menjadi faktor penting dalam perkembangan industri. Faktor keempat yang mendukung industri adalah ketersediaan energi. Sejak tahun 1969, dua bendungan besar yaitu Karangkates dan Selorejo telah dilengkapi dengan pembangkit listrik yang masing-masing mampu menghasilkan berturut-turut 300 juta kwh per tahun dan 22 juta Kwh per tahun.

Di kota Malang berkembang cukup banyak industri. Industri yang paling banyak dijumpai di Mlang adalah industri rokok. Beberapa yang bisa disebutkan itu antara lain PT Faroka SA. Pabrik ini memproduksi rokok merk Aida, Judha, Wembley, Kansas dan River. Disamping itu terdapat Pabrik rokok PT Grendel, dan Bentul, PT Bajubiru, Gadjah, Corvet, PT ATOMCY. Pabrik-pabrik ini rata-rata menghasilkan roko putih seperti *Gueen, Grand Westly, Asiade, Marine, Race, Honey, Melody, Tacta, Massa, dan Niagara*. Beberapa industri lain yang dijumpai di Malang adalah industri penyamakan kulit, industri mebel, perusahaan sepatu, perusahaan keramik, mekanik dan bengkel, dan perusahaan hasil olahan pertanian. (*Kotamadya Malang limapuluh tahun, 1 April 1914- 1 april 1969, hlm. 159-163*).

Namun seiring dengan promosi efek negatif dari merokok, jumlah produsen rokok semakin menurun. Jika pada awal tahun 1950 hingga 1970an industri rokok menjadi pemasok pajak terbesar, maka pada tahun 2013 kondisi berubah. Rata-tara pemasukan dari sektor pajak tertinggi adalah dari pajak hotel. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2013 hingga desember 2013.

2. Perkembangan dari Pasar Ke Plaza

Berdasar penelitian ini, terdapat empat factor penyebab dan dampak dari komersialisasi ruang kota. Faktor pertama yang memunculkan komersialisasi adalah perkembangan industri perkebunan yang terjadi sejak periode kolonialisme Belanda. Komersialisasi adalah proses yang telah berlangsung sejak pemberlakuan *Culturstelsel* (tanam paksa) pada tahun 1830. Tekanan dari penguasa colonial Belanda kepada penduduk Jawa untuk menanam tanaman perdagangan telah memiliki dampak terhadap masyarakat

jawa. Eksploitasi pada saat itu masih dimonopoli oleh Negara dan belum melibatkan swasta. Pola investasi dalam bentuk properti tanah mulai diaplikasikan. Pola investasi property itu telah menjadikan tanah yang semula kurang dianggap bermakna ekonomis menjadi semakin mahal. Keberhasilan eksploitasi melalui industri perkebunan ini mendorong kelompok swasta untuk ikut meraup keuntungan bisnis di tanah jajahan. Harga tanah menjadi semakin mahal ketika jumlah Penduduk Eropa makin bertambah. Meningkatnya arus perputaran uang ini mendorong pertumbuhan pasar di kota-kota yang sebagian besar menjadi pusat kegiatan transaksi. (Nas: 1986, 15) Proses ini tidak berakhir pada saat Pemerintah Republik Indonesia “mengusir” investor dan perusahaan asing, namun terus berkelanjutan hingga era pemerintahan Soeharto

Faktor kedua yang menentukan terbentuknya kota sebagai pusat kegiatan komersil adalah faktor politis. Desentralisasi pada tahun 1903 telah menyebabkan Batavia tidak lagi menjadi satu-satunya penyusun kebijakan pemerintahan, namun jua kota-kota lain yang dinyatakan mendapat status Gemeente. Kota yang mendapat status Gemeente memiliki kewenangan menentukan anggaran dan mengelola keuangan secara mandiri. Dampak finansil dari keputusan ini adalah berkembangnya unit-unit Gemeente yang dibentuk untuk menghasilkan “devisa local”.(Hudiyanto; 2001, 151)

Faktor Ketiga yang menentukan terjadinya proses komersialisasi – pasca kemerdekaan, adalah kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan komersil di Malang terjadi sangat cepat pada periode 1985-1995. Kebijakan ekonomi Orde Baru pada awal 1980an yang membuka pintu bagi investor dan menerima pinjam asing mempengaruhi perubahan pola toko menjadi plaza-plaza. Pada periode 1982-83, *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *International Government Group for Indonesia* (IGGI) mulai mengucurkan paket pinjaman lunak \$5 billion dan \$ 2.2 billion,- . Di sisi lain, pemerintah Soeharto berhasil meningkatkan ekspor non-migas dan menerpakan kebijakan anggaran ketat. Paket eekonomi “liberalisasi dagang” yang ditawarkan Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana telah memberi keyakinan pihak IBRD untuk memberikan paket pinjaman ke Pemerintah Soeharto (Robinson; 2009, 387). Kondisi ekonomi nasional ini berdampak pada ekonomi regional. Ini menjadi factor

pendorong perkembangan ekonomi di Malang yang ditandai dengan munculnya plaza-plaza di kota pada awal tahun 1985.

Dampak dari perkembangan plaza itu adalah merebaknya sektor hiburan. Di sisi lain, perkembangan pusat komersil secara tidak langsung mendorong alih fungsi ruang. Pertumbuhan plaza ini telah mengubah *landscape* pusat kota. Inti kota tidak lagi menjadi pusat kegiatan politik namun lebih didominasi kegiatan perdagangan. Ini membuktikan adanya perubahan tendensi dari perubahan kota selama 80 tahun dari sektor hiburan-pemerintahan ke sector perdagangan-bisnis. Efek lain adalah munculnya kelompok social disorder, atau kelompok yang menyimpang dari tatanan sosial kota seperti prostitute dan kriminal. Untuk penjelasan yang lebih detail akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

Konsep Pasar Besar sebagai pusat kegiatan komersil telah diterapkan sejak 1930an. Pasar – yang di dalam tradisi Jawa diselenggarakan menurut konsep hari-hari Jawa, diubah menjadi pasar yang menetap dan menggunakan konsep harian. Bentuk pasar ini tidak mengalami perubahan. Konsep dan model pemerintahan lokal serta manajemen penataan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial terus dilanjutkan oleh Pemerintah Kotapraja. Berbagai penataan gubuk liar, penangkapan PKL dan penanganan gangguan keamanan menjadi pekerjaan Pemerintah Kotapraja sejak dari tahun 1950-1958 (Kotapraja Malang 50 Tahun; 1965). Peristiwa serupa juga disebutkan dalam beberapa surat kabar yang terbit pada periode 1951 hingga 1954 seperti *Terompet Masyarakat, Malang Pos*, dan *Pewartu Surabaya*. Kondisi perekonomian yang labil sebagai dampak kericuhan politik pasca Nasionalisasi Perusahaan Belanda berpengaruh pada pertumbuhan sektor perdagangan.

Hilangnya pengaruh ekonomi Belanda pada tahun 1957 dan dominasi komunis pada tahun 1964-5 dan dilanjutkan dengan pemerintahan Orde baru pada tahun 1967 telah menjadi periode stagnasi dalam kehidupan perdagangan di kota Malang. Tidak ada pembangunan simbol komersial baru pada periode tersebut. Setelah tahun 1980, modal asing mulai banyak berdatangan, dan ini memberi peluang kelompok pemodal di dalam negeri untuk meluaskan modal dan korporasinya (Robinson; 2009, 374-5). Krisis ekonomi 1980 sebagai dampak jatuhnya harga minyak dunia telah membuat pertumbuhan ekonomi nasional terhenti. Ini menyebabkan sector ekonomi di daerah,

khususnya Malang lesu. Dengan daya beli masyarakat yang melemah, pendirian *supermarket* bukan menjadi pilihan usaha yang menguntungkan.

Titik awal perkembangan symbol kapitalisme adalah Sarinah Plaza. Sekalipun plaza identik dengan tempat perbelanjaan bagi kelompok masyarakat berada, nama Sarinah tetap dijadikan label karena mengacu pada nama asli Indonesia (pembantu dari Soekarno). Bekas gedung *Societeit Concordia* yang terletak di tengah Kota Malang dan pernah digunakan untuk sidang Komite Nasional Indonesia Pusat itu yang kemudian hancur rata dengan tanah waktu perang kemerdekaan menurut keterangan akan dibangun *shopping centre* lantai 3. Menurut kotapraja ditempat itu akan dibangun 96 petak, tingkat 1 untuk toko, tingkat 2 untuk barang lux dan tingkat 3 untuk pertemuan dan biaya pembangunan sekitar 10 juta (*Harian Umum*, 17 Juni 1969)

Sarinah adalah *supermarket* pertama di Malang. Sebelum era kemerdekaan, sebagian besar kelompok masyarakat ekonomi atas lebih memilih berbelanja di kompleks pertokoan di jalan Kayu Tangan. Pada awalnya Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara. Karakteristik dari plaza adalah keunggulan di suasana. Hampir semua ruangan berpendingin. Kompleks tidak hanya terdiri dari *supermarket* namun juga pertokoan dan bioskop. Arsitektur, penataan, juga pelayanannya, sangat modern, disesuaikan dengan tuntutan zaman seperti yang diungkapkan Humas PT Sarinah Malang (*Jawa Pos*, 23 Februari 1992). Semenjak tahun 1980-an Plaza Sarinah ini mengalami modernisasi beberapa kali. Pada saat itu Sarinah masih menjadi satu-satunya plaza.

Hingga tahun 1985, belum banyak *supermarket* yang berdiri. Seorang informan menyebutkan pasar di Malang belum siap dengan model toko *supermarket*. Pada awal tahun 1980an, para pengusaha pertokoan di Malang tampaknya belum antusias membuka toko dengan sistem swalayan. Meski menjelang tahun 1984, mulai dirasakan adanya pertumbuhan pusat perbelanjaan namun bukan dalam bentuk toko swalayan Buktinya, sampai saat ini satu toko saja yang sudah menerapkan sistem swalayan yaitu Tiara *Supermarket*. Tiara *Supermarket* ini telah dibuka pada tahun 1977. Namun toko swalayan yang dibuka oleh toserba “Sarinah”, Malang itu hanya menempati bagian kecil dari pertokoan bertingkat dua itu. Praktis, di Malang hanya ada dua pertokoan yang membuka sistem sejak 10 tahun terakhir. Di sisi lain, pihak pemda selalu memberikan kemudahan izin, menurut kabag perekonomian Kodya Malang, Sri Handayani SH. Persyaratan pendirian *Supermarket* adalah

tidak menyalahi tata kota dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. (*Jawa Pos*, 26 Oktober 1985)

Menurut salah seorang pengusaha pertokoan di Malang, membuka toko swalayan di kota ini tidak mudah. Selain membutuhkan investasi yang besar, juga harus memenuhi selera konsumen. Sedangkan konsumennya masih canggung memasuki toko dengan servis swalayan. Faktor ini yang membuat pengusaha memilih tidak membuka toko swalayan dari pada mesti gulung tikar. Sekalipun izin usaha pertokoan masih terbuka lebar, kata sumber tadi tidak akan merangsang para pengusaha. Sebab izin usaha itu sendiri belum tentu menjamin barang dagangan akan laku. Itulah sebabnya beberapa pengusaha toko menilai, membuka pertokoan swalayan di Malang diperlukan upaya penjajakan. Atau paling tidak menunggu sampai konsumennya terbiasa belanja di *supermarket*. Ketiga, menurut Sastro Senjoyo yang 8 tahun mengelola “Tiara *Supermarket*” . Kendati ia telah memberikan harga sama dengan pasar, pengunjung masih merasa canggung. Oleh karena itu, pemilik Swalayan tidak dapat mengambil keuntungan dari barang-barang kecil (*Jawa Pos*, 26 Oktober 1985)

Supermarket kedua yang berdiri setelah Sarinah adalah Malang Plaza. Plaza ini dibangun oleh PT Hakim Sentosa. Gedung yang dibangun di atas tanah 0.6 hektar itu pembangunannya menelan biaya Rp 2.3 miliar. Itu merupakan pusat pertokoan terbesar dan megah di Malang hingga tahun 1985. .Sampai Selasa kemarin tidak kurang dari 85 persen lebih dari jumlah 175 stan telah terjual. Gedung pusat pertokoan yang juga menyediakan sarana *Departement Store*, *restaurant*, *supermarket*, gedung bioskop dan mainan anak-anak itu dimulai pembangunannya bulan Maret tahun lalu. Menurut rencana akan dibuka secara trial opening akhir April bulan ini (*Jawa Pos*, 2 Oktober 1985).

Malang plaza mempekerjakan sekitar 400 tenaga kerja. Kekurangan dari Malang Plaza adalah tidak cukupnya lahan parkir jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung. Ini membuat para pengusaha toko di Malang Plaza mengajukan protes ke Walikota Tom Uripan. Keterbatasan sarana parkir di pertokoan itu menyebabkan beberapa pemilik stan di toko itu mengeluh karena konsumen enggan masuk Plaza tersebut (*Jawa Pos*, 3 Oktober 1985).

Kawasan perdagangan berikutnya yang berdiri setelah Malang Plaza adalah Gajah Mada Plaza. Kawasan ini berdiri di bekas lahan Bioskop Grand, atau Agung di jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten merupakan salah satu jalan penting di Kota Malang. Gajah mada Plaza ini dibangun dengan nilai investasi Rp. 3 Miliar,- oleh PT Hasta Perkasa. Batu pertama pembangunan pusat perbelanjaan sekaligus rekreasi ini dilakukan oleh Walikota Malang, Tom Uripan. Kawasan Plaza ini menempati lahan seluas 4000 meter persegi yang

dilengkapi parker basement seluas 3000 meter persegi. Gedung ini dapat menampung 80 stand yang dilengkapi escalator, food centre dan dua air mancur yang juga berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Kawasan perdagangan baru ini dapat mempekerjakan 370 orang tenaga kerja (*Jawa Pos*, 23 Oktober 1985). Munculnya dua plaza dalam waktu yang relative bersamaan ini menunjukkan bahwa kondisi pasar dan pasar modal telah mengalami perbaikan pada tahun 1985. Perkembangan model pasar swalayan dan plaza secara tidak langsung berkembang seiring munculnya film-film yang mempopulerkan tren gaya hidup yang sering menawarkan model *supermarket* dan plaza.

Pada 24 Februari 1992 Mitra Departemen Store II akan diresmikan. Kompleks ini didirikan di Jalan Let Jend Sutoyo. Gedung yang dibangun dalam waktu tujuh bulan itu menghabiskan dana Rp 3,5 miliar. Mitra II akan menyedot 1.000 orang tenaga kerja,” menurut Hadi Utama, salah seorang direksi Mitra. (*Jawa Pos*, 23 Ferbruari 1992) “Kami ingin memenuhi tuntutan masyarakat Malang yang masih kekurangan pusat perbelanjaan yang memadai,” menurut Direktur MDSS (Mitra *Departement Store* dan *Supermarket*). Gedung Mitra II yang terdiri dari 4 lantai itu akan diresmikan pada tanggal 24 Februari,” katanya. Pembangunan gedung yang ididrikan di atas tanah seluas 3.000 meter persegi itu menghabiskan dana sekitar 4 milyar. Dan atersebut diperoleh dari kas Mitra dan pinjaman bank. Mitra II direncanakan akan menyedot tenaga kerja yang lebih besar, yaitu 1000 orang. (*Jawa Pos*, 7 Februari 1992) Munculnya kompleks pertokoan megah dengan arsitektur cita rasa tinggi telah menjadi objek wisata baru bagi masyarakat Malang dan sekitarnya.

G. Dampak Komersialisasi Ruang

Proses komersialisasi ruang kota menyebabkan kompetisi atas ruang promosi meningkat. Pada era colonial Belanda, reklame dipublikasikan melalui surat kabar, dan poster di depan toko. Setelah periode Kemerdekaan, ruang publikasi menjadi semakin meluas. Pada tahun 1980an, reklame mulai menempati sarana-sarana strategis seperti pinggir bahkan di atas jalan. Semakin banyaknya papan reklame itu ternyata telah mengundang kritik, karena mengganggu keindahan. Ini terjadi pada tahun 1992. Pada saat itu ada lima papan reklame yang ada di jalan utama kota. Lima papan reklame rokok di bekas jalan masuk lingkungan parkir di Malang dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sudah saatnya dibongkar. Selain bangunnanya terletak persis di badan jalan raya juga kehadirannya sekarang ini dirasa sangat mengganggu. “Kami rasa iklan itu memang sudah saatnya ditinjau penempatannya. Sekarang ini fungsinya juga sudah tidak ada lagi. Bahkan cenderung mengganggu. Oleh karena itu, sudah saatnya dibongkar,” ujar Karel Pandanaian, Ketua

Fraksi Demokrasi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Konstruksi papan reklame produk rokok tersebut terdapat di Jalan Pasar Besar, Jl. Zainul Arifin, Jl. Kiai Tamin, dan Jl. Prof Moh Yamin. Seluruh tiang penyangga papan reklame itu berada ditengah jalan raya itu, seluruhnya memang masuk kawasan pasar besar. Sedangkan papan reklame itu ternyata masih terus bertengger. Di tengah jalan, belakangan papan reklame itu terasa sangat mengganggu. Terlebih setelah areal Pasar Besar yang juga dikenal masyarakat Malang sebagai daerah Pecinan itu kini sudah bersih dari penampungan pedagang. Pembongkaran Papan reklame itu sudah direkomendasi oleh wakil ketua Dewan PRD Kota Malang dan, ketua komisi A bidang pemerintahan (*Jawa Pos* 27 Februari 1992)

Efek kedua adalah munculnya problem lahan parkir. Lahan parkir yang menempati posisi paling strategis adalah di kawasan Pasar Besar Malang. Sejak jaman kolonial Belanda, lahan parkir sudah menjadi mata pencaharian warga, namun belum dimasukkan dalam kategori perolehan pajak. Pengelolaan lingkungan parkir dijalankan oleh Pemda Malang. Lingkungan parkir itu akhirnya memang harus dihentikan oleh pemerintah karena memang ditengarai justru ada penarikan ganda. Sejak itulah, kawasan lingkungan parkir yang ada di pasar besar dan sekitarnya itu, kembali kepada fungsi jalan umum seperti semula.

Efek ketiga adalah perubahan *landscape* kota akibat perubahan fungsi lahan. Salah satu konsekuensi logis dari perluasan areal komersial adalah munculnya desakan untuk mengubah peruntukan lahan. Beberapa tempat strategis di kawasan perdagangan adalah tempat bersejarah (*heritage*). Oleh karena itu, kebijakan *ruislag* (tukar guling) ini menjadi solusi terhadap asset-asset pemerintah kota yang ada di kawasan pusat kota. Daftar *ruislag* itu meliputi Taman Indrokilo seluas 3,8 hektare; Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) seluas 0.8 hektare; Tanah dan bangunan Balai Holtikultura, seluas 4.76 hektare; tanah dan bangunan terminal Pattimura seluas 1.3 hektare; Gedung dan Tanah Sarinah Malang seluas 5.825 meter persegi dan Gedung Philip Morris seluas 0.235 hektar.

Kompensasi yang diperoleh masyarakat Malang dari langkah tukar bangunan Pemda ini meliputi pembangunan Gedung Kartini, kantor Parpol dan Golkar, rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gedung Bapeltukda, pembelian tanah perumahan, gedung Repabri, sanggar seni, Kantor Dinas Kebersihan, Gedung Kesenian Gajayana, perluasan gedung kantor pemda, terminal Arjosari dengan segala perlengkapannya, terminal Landungsari, jalan tembus pasar induk Gadang, Pasar Induk Dinoyo, pembelian tanah berhektare-hektare di beberapa lokasi sebagai pengganti dan peruntukan lainnya, beberapa pembangunan gedung perkantoran dan masih banyak lagi.

Semua hasil kompensasi ini, saat ini sudah difungsikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sekalipun demikian, dalam sebuah polling muncul perbedaan respon tentang masalah tukar guling. Pihak yang setuju dan yang tidak memiliki jumlah yang hampir sama. Empat puluh delapan persen dari 50 responden yang diwawancarai, menyatakan setuju. Adapun alasannya, sebagian besar menyatakan karena dengan *ruislag*, pemda dapat memiliki sarana fasilitas umum bisa dibangun bagus dan representative bagi Malang sebagai kota Besar. Kedua pengadaan fasilitas umum yang modern itu, lebih dibutuhkan masyarakat, daripada gedung-gedung tua atau tanah-tanah aset pemda yang tak fungsional. Meski letaknya strategis dan mengandung nilai historis. Bagi pihak ini nilai historis atau lokasi yang strategis dari gedung-gedung dan tanah-tanah itu, tampaknya bagi mereka bukan lagi muatan nilai yang mesti diberati, ditengah tuntutan kebutuhan masyarakat modern ini.

Di lain pihak, responden yang tidak setuju terhadap *ruislag*, mayoritas beralasan karena dengan *ruislag*, aset bersejarah yang dimiliki Kota Malang akan berkurang. Sementara itu, beberapa yang lain menyatakan nilai kemanfaatan dari *ruislag* tidak berimbang. Dengan kata lain, titik berat kepentingan investor lebih menonjol daripada kepentingan umum. Mayoritas latar sosial responden yang tidak setuju berasal dari kampus. Beberapa diantaranya dosen yang mantan aktivis mahasiswa pada 1966. Jejak pendapat ini tidak lepas dari karakter Walikota Malang, Soesanto yang memang dikenal terbuka (*Jawa Pos*, 9 April 1992).

Resistensi dari pedagang adalah efek keempat dari komersialisasi lahan, khususnya pasar. Pasar besar dianggap sebagai representasi kepentingan pedagang tradisional dengan pangsa pasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pasar besar ini dimodernisasi pada tahun 1992 atas kerjasama Pemerintah dengan PT Surya KF. Modernisasi pasar ini menghabiskan dana Rp.32 Milyar. Berbeda dengan swalayan, para pedagang tidak begitu mempertimbangkan kenyamanan, namun lebih pada kedekatan dengan calon pembeli. Ini dibuktikan dengan kasus keengganan pedagang menempati los baru. Tidak kurang dari 63 pedagang buah pasar Besar Kodya Malang sampai kemarin ternyata masih enggan masuk pasar. Meski batas waktu yang disediakan bagi mereka untuk masuk pasar - yang selesai dibangun dengan dana sekitar Rp 32 miliar rupiah, telah habis siang kemarin. Mereka masih saja berjualan di beberapa jalan di sekitar pasar yang dianggap lebih menguntungkan.

Pedagang buah yang memang dijadwalkan paling akhir untuk masuk pasar kemarin memang masih saling menunggu. Mereka merasa akan rugi kalau keburu masuk pasar. Sebab diperkirakan pembeli akan lebih banyak di luar pasar daripada di dalam pasar. Karena itu,

mereka tidak juga bergegas masuk pasar sekalipun batas waktu yang diberikan telah habis. Lokasi pedagang buah yang ada di sebelah selatan di lantai dasar pasar itu memang banyak yang belum ditempati. Di antaranya memang masih ada yang membenahi konternya. Sedangkan jumlah yang sudah menempati juga tidak sampai separo dari jumlah konter yang ada.

Ketua tim pembangunan Pasar Besar itu, Drs Maschut mengakui bahwa pedagang buah belum seluruhnya dipindah. Sementara batas akhir sudah terlewati, karena itu akan diadakan penertiban. Penertiban pedagang buah ini, menurut Maschut, memang perlu didahulukan. Sebab kalau tidak, lanjutnya, pengaturan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini membaaur dengan pedagang pasar selama di tempat penampungan akan sulit. Walikota Malang Soesanto mengatakan bahwa Pedagang Kaki Lima baru tidak bisa masuk pasar jumlahnya memang cukup banyak, tidak kurang dari 2.000. mereka akan ditempatkan sementara di Jalan Piere Tendean, Zaenal Zakse, dan Ade Irma Suryani. Mereka akan menempati jalan-jalan itu selama tiga bulan. Setelah itu akan dicarikan tempat baru (*Jawa Pos*, 27 Februari 1992).

Dampak kelima dari perkembangan komersialisasi lahan perkotaan adalah berkembangnya tempat hiburan malam dan prostitusi. Perkembangan dinamika masyarakat dan peningkatan arus kunjungan wisatawan telah membuka peluang bagi para pengusaha hiburan. Banyak pengusaha Malang yang berusaha memanfaatkan peluang tersebut. Banyak pula pengusaha asal Surabaya dan Jakarta yang membuka sendiri atau bekerja dengan warga Malang untuk membuka bisnis tersebut. Di beberapa sudut kota Malang, terus bertumbuhan sarana hiburan yang tengah *ngetrend*, seperti diskotek, karaoke, pub, restoran restoran besar, salon dan gedung gedung bioskop yang dilengkapi dengan layar dan *sound system* canggih.

Pada tahun 1990an, terdapat beberapa tempat hiburan di Malang seperti Basement Diskotik, Tiga Putra Karaoke, May Plase Karaoke, dan banyak lagi, termasuk diskotek dan karaoe di Kartika Prince Hotel. Tempat-tempat hiburan itu hampir tak pernah sepi pengunjung, baik dari kalangan remaja maupun masyarakat setengah baya yang tetap berjiwa muda.

“Jangan heran bila melihat kami berkunjung ke diskotek atau karaoke. Setelah bekerja keras sehari penuh, kami perlu *refreshing*,” kata seorang lelaki berusia 45 tahunan yang namanya tidak disebutkan di Koran (*Jawa Pos*, 21 Februari 1992).

Kondisi ini terjadi karena Malang telah berkembang menjadi kota besar yang menuntut warganya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa terjangkau *workaholic*. Kemunculan kelompok profesional baru yang masih muda nampaknya

dianggap sebagai pangsa bagi pelaku jasa hiburan. Berikut ini adalah anggapan dari publik tentang tempat hiburan malam

“Sulitnya, di Kota Malang yang baru berangkat maju seperti ini masih cenderung ada sorotan bagi orang-orang yang keluar masuk tempat hiburan. Seolah-olah yang boleh masuk diskotek hanya anak-anak muda saja. Padahal, mestinya kan tidak demikian. Kami pun ingin *enjoy* seperti mereka setelah seharian bekerja keras,” kata direktur suatu perusahaan besar yang kemana-mana selalu membawa telepon genggamnya itu. “Sorotan itu masih ada karena belum seluruh masyarakat di sini memahami kebutuhan orang-orang modern,” tambahnya (*Jawa Pos*, 21 Februari 1992).

Basement Discotic yang berlokasi di kompleks Gajah Mada Plaza yang hanya dibuka tiap Rabu, Sabtu, dan Minggu, itu hampir dapat dipastikan selalu dipenuhi pengunjung. “Mulai pukul 13.00 hingga malam hari, tempat ini selalu dipenuhi pengunjung,” kata salah seorang karyawan Gajah Mada Plaza. Fenomena yang sama dijumpai di diskotek di Kartika Prince Hotel itu tidak pernah sepi. Meski tempatnya di Kartika Prince Hotel ini tidak hanya diperuntukkan tamu-tamu hotel saja, namun juga dari luar.

Hiburan lain yang mendapat kunjungan adalah karaoke. Bentuk hiburan baru ini disukai para remaja untuk menyalurkan hobi menyanyi maupun para pengusaha yang ingin relaksasi yang menghilangkan kepenatan. Hiburan itu juga disediakan di hotel-hotel besar, seperti Regent Park Hotel, Kartika Prince Hotel, dan Montana Hotel sebagai promosi penarik pengunjung.

Bentuk hiburan lain adalah gedung bioskop. Gedung bioskop memang merupakan sarana yang paling populer di Malang sejak era kolonial. Di Malang ada 20 gedung bioskop yang tergolong sebagai tempat hiburan dan indikator untuk layak disebut sebagai kota besar. Harga karcis masuk ke sarana hiburan layar perak ini bervariasi, mulai untuk kalangan bawah sampai kelas atas. Gedung bioskop kelas bawah yang ada di Malang antara lain Kelud. Bioskop Kelud dikenal sebagai gedung bioskop “misbar” alias kalau gerimis bubuar, dengan karcis Rp 500 per orang.

Dua gedung bioskop yang termasuk besar dan pada 5 tahun terakhir dikenal dengan sinespleks adalah Mandala yang memiliki empat studio dan Mutiara dengan dua studio. Gedung-gedung ini tak pernah sepi dari pengunjung. Sebagian besar pengunjung bioskop ini berasal dari golongan menengah ke atas,

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, bisa dikatakan bahwa hampir seluruh gedung bioskop besar di Malang mengikuti gaya sinepleks. Beberapa contoh bioskop yang menggunakan gaya Cineplex adalah Mandala di Jalan Agus Salim, Mutiara di Jalan Trunojoyo, Dinoyo di Jalan M.T Hariono, dan gedung bioskop Sukun di Jalan Sudanco Supriyadi. Beberapa gedung bioskop lain masih yang tetap ber" gaya lama", seperti gedung bioskop Irama di Jalan Letjen S. Parman dan Merdeka di Jalan Basuki Rahmat.

Efek lain dari perkembangan dunia komersil dan dunia hiburan adalah tumbuhnya prostitusi. Tempat-tempat mangkal wanita penghibur banyak dijumpai di lokasi di kota Malang yaitu Kalisari. Kompleks yang dihuni sekitar 200 WTS ini letaknya tiga kilometer dari tengah kota. Lokasi adalah salah satu "produk sosial kota besar". Dalam rangka penertiban, dan menjaga keamanan kompleks, Lokasi ini harus ditutup pada pukul 21.00 WIB.

Fenomena yang menarik adalah munculnya Tempat mangkal wanita penghibur secara terselubung yang cenderung menjamur di kota. Salah satu contoh adalah sebuah hotel kecil di bilangan Jalan Letjen Sutoyo. Di tempat tersebut banyak dijumpai kupu-kupu malam. Jika seorang tamu ingin kencan dengan WTS golongan ini, dikenakan tarif Rp 30.000 sampai Rp 50.000 untuk *short time*. "Tarif di luar sewa kamar lho Mas," kata seorang petugas hotel sambil tersenyum.

Di beberapa hotel lain, meski tidak ditemui hal serupa, ada petugas hotel yang bisa "dimintai tolong." Hal inilah yang mestinya mendapat perhatian Pemda untuk segera menertibkan. Masyarakat menghendaki sanksi yang keras kepada pihak yang dapat merusak citra hotel yang baik dan bersih yang jumlahnya tentu lebih banyak di kota Malang.

Disamping wanita tuna susila, ada istilah lain yang dikenal untuk menyebut penyedia jasa seks yaitu pereks (perempuan eksperimen). Keberadaan pereks ini sangat terselubung, antah benar-benar berstatus pelajar atau mahasiswa, di Malang pun hal ini dapat dibuktikan. Ada "penghubung" yang mengaku bisa "membantu" mencarikan pereks, lengkap dengan *iming-iming* keterangan dari sekolah anu atau perguruan tinggi anu. Padahal, belum tentu yang "dikecapkan" mereka itu benar. Atau, bisa saja mereka tidak benar-benar sekolah atau kuliah, melainkan masuk sekolah atau kuliah agar dinilai lain dan tarifnya naik. Embel-embel "pelajar" atau "mahasiswa" itu bisa menaikkan tarifnya. Berdasar informasi, tariff pereks tidak terlalu mahal, "hanya berkisar Rp 100.000 sampai Rp 200.000 untuk *short time*. "Untuk mengelabui ibu kosnya agar tidak diketahui kalau sedang di-*booking* orang, para pereks ini biasanya pamit belajar di rumah teman," kata seorang "perantara" di Jalan Buah-buahan.

Satu lagi jenis kamufase tempat transaksi pemuas birahi di Malang, yaitu tempat yang biasa disebut *show room*. Tempat ini biasanya menyediakan wanita panggilan. Biasanya jumlah penghuni masing-masing *show room* sampai belasan wanita. Bila ada permintaan, seorang petugasnya selalu siap mengantar “barang” nya ke hotel tempat menginap pemesannya. Model *show room* semacam ini misalnya, terdapat di sebuah Jalan Bandung, Jalan Trunojoyo, Jalan MT Hariyono, Jalan Serayu dan Jalan Tampak Siring. Kelompok ini memang konsumen tamu-tamu dari luar kota. Karena itu, oleh bosnya, ia melengkapi keterampilan anak asuhnya dengan keterampilan khusus. Tarif wanita penghibur kelompok ini hampir sama dengan tarif “pereks”, yaitu Rp 50.000 sampai Rp 100.000 (*Jawa Pos* 21 Februari 1992).

Deskripsi dampak sosial ini memang menjadi gejala umum yang terjadi hampir di seluruh kota-kota besar. Peningkatan taraf ekonomi kota, dan munculnya simbol kemewahan yang ditawarkan di berbagai plaza merupakan salah satu ”daya tarik” bagi kelompok masyarakat di kota. Sebagai dampak tidak langsung, kemewahan yang ditawarkan di plaza dan diperkuat dengan pencitraan simbol modernisasi melalui produk cineplex

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan kota tidak akan terjadi jika tidak diawali dengan perubahan pasar. Perkembangan dari Pasar Tradisional ke Pasar modern merupakan symbol dari terjadinya proses kapitalisasi kota. Dalam hal ini, factor ekonomi berupa peralihan Kota pra-industri ke Kota post Industri telah mendorong fungsi pasar sebagai penyedia kebutuhan hidup. Faktor politik juga berkontribusi terhadap komersialisasi ketika Desentralisasi 1903 telah memperkuat fungsi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Tuntutan pemerintah kota untuk mandiri secara ekonomi, dan memaksimalkan target keuangan local telah “memaksa” kotapraja mengkomersilkan semua asset dalam kota.

Sebagai sebuah sistem ekonomi, kapitalisme telah menciptakan komersialisasi ruang karena kota dianggap sebagai lahan investasi. Modernisasi pasar, pembangunan jaringan air bersih, perumahan dan rumah pemotongan hewan merupakan bagian dari investasi. Beberapa saat setelah mengalami puluhan tahun dalam situasi turbulensi politik, kebijakan ekonomi Orde Baru pada awal 1980an yang membuka investor dan menerima pinjam asing telah melanjutkan proses komersialisasi ruang. Dampak lanjut dari komersialisasi ini adalah proses perkembangan plaza. Perkembangan plaza telah mengubah fungsi pasar tidak lagi menawarkan barang namun juga hiburan dan gaya hidup. Merebaknya sector hiburan, dan efek sosial yang muncul sebagai dampak tidak langsung perkembangan komersialisasi ruang. Pertumbuhan plaza ini telah mengubah *landscape* pusat kota dari pusat kegiatan politik menjadi lebih didominasi sector ekonomi perdagangan. Ini membuktikan adanya perubahan tendensi dari perubahan kota selama 80 tahun dari sector hiburan-pemerintahan ke sector perdagangan-bisnis. Hampir sebagian besar bangunan *heritage* yang termasuk cagar budaya digantikan dengan bangunan baru yang lebih berorientasi ke pasar dan perkembangan ekonomi.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

- Harian Umum*, 17 Juni 1955
Jawa Pos, 2 Oktober 1985
Jawa Pos, 3 Oktober 1985
Jawa Pos, 23 Oktober 1985
Jawa Pos, 26 Oktober 1985
Jawa Pos, 7 Februari 1992
Jawa Pos, 21 Februari 1992
Jawa Pos, 23 Februari 1992
Jawa Pos, 27 Februari 1992
Jawa Pos, 9 April 1992
Malang Pos, 5 Djuni 1952
Malang Pos, 17 January 1952
Terompet Masyarakat, 28 Sept 1956
Pewarta Soerabaia, 13 Maret 1954

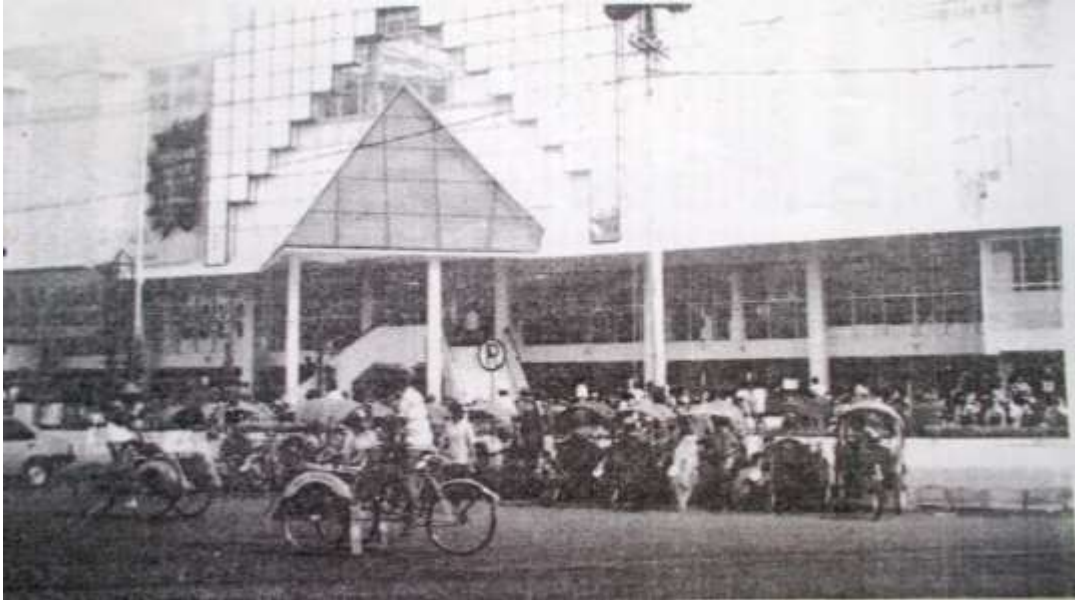
Pustaka

- Cipolla, Carlo ed *Before the industrial revolution: European Society and Economy 1000-1700* New York, 1980, hlm 320.
- Colombijn, Urban Construction. *The Politics of Urban Space and Housing During the Decolonization of Indoneisa 1930-1960*. Leiden: KITLV, 2010
- Furnivall, John Sydenham, 1944, *Netherlands India, A Study of Plural Economy*. Cambridge,
- Garraghan, Gilbert J. 1962, *A Guide to Historical Methods*. Wisconsin: Fordham
- Grijn, Kees & Nas, J.M. Peter (et. al.) 2007. *Jakarta Batavia Esay: Sosio-Cultural*. Jakarta: KITLV-Jakarta
- Hall, Peter 1993. *Cities of Tomorrow*. Oxford: Blackwell Publisher
- Jaarverslag der Malang Stoomtram Maatschappij 1911-1919*. Weltevreden: Landsdrukkerj.
- Junus, Hadi Sabari. 2008, *Klasifikasi Kota*, Yogyakarta: Tiara Wacana,

- Kotapradja Malang 40 Tahun*, Panitia Peringatan 40 tahun Kotapradja Malang, 1954
- Kusno, Abidin, 2000, *Behind the Postcolonial, Architecture, Urban space and Political Culture in Indonesia*. London: Routledge
- Lakeman P.K.W 1934, *Stadsgemeente Malang*. Uitkolff: Soerabaia
- Nas, Peter J.M. (et.al) , 2002. *The Indonesian Town Revisited*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Nas, Peter, J.M . (et.al).1986, *The Indonesian City. Studies in Urban Development and Planning*. Cinnaminson: Forish Publication.
- Panitia Peringatan 50 tahun Kotapradja Malang, *50 tahun Kota Malang*. 1964
- Reza Hudiyanto, 2011 *Menciptakan Masyarakat Kota: Malang di Bawah Tiga Penguasa 1914-1950*. Yogyakarta: Lilin
- Robinson, Richard, 2009, *Indonesia. The Rise of Capital*. Singapore: Equinox Publishing.
- Sjoberg, Gideon.1965 *Preindustrial City, Past and Present*. New York: Free Press
- Suhartono, *Apanage dan Bekel*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Van Liempt, F.J.M, 1939. *Kroniek Der Stadsgemeente Malang over het Jaren 1914-1939*. Surabaya: Uitkolff,
- Peter Boomgard (eds), 2007. *World of Water. Rain, rivers adn seas in Southeast Asian Histories*: Leiden, KILV

LAMPIRAN FOTO

1. Foto Pasar Besar yang diresmikan Mendagri Rudini tahun 1992 (Jawa Pos, April 1992)



2. Gajah Mada Plaza 1995 (Jawa Pos Oktober 1985)



3. Tempat parkir yang semrawut di depan Malang Plaza (Jawa Pos Oktober 1985)



4. Foto papan reklame yang dianggap mengganggu pemandangan (Jawa Pos, Oktober 1985)

